SEKRETARIAT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-3912812
Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id
Website : www.wapresri.go.id

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TNP2K

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Judul: **Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: travelyuk.wordpress.com, wb09blog.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id

DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: *Composite Food Security Index*
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: *Food Insecurity Atlas*
FSVA	: *Food Security and Vulnerability Atlas*
HDI	: *Human Development Index*
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: *World Food Programme*

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Pertumbuhan Ekonomi 1
Inflasi 4
Nilai Tukar Petani 5
Tingkat Kemiskinan 6
Indikator Kemiskinan 7
Program Penanggulangan Kemiskinan 8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan 9
Bidang Kesehatan 11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 15
Bidang Pendidikan 17
Akses Terhadap Air Bersih 19
Akses Terhadap Sanitasi 20
Indeks Pembangunan Manusia 21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia 22
Ketahanan Pangan 23
Prioritas Bidang Pendidikan 26
Prioritas Bidang Kesehatan 28
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar 31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan 34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat 35
PNPM Mandiri 36
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 37
Keuangan Daerah 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2010

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2009 – 2010 (Persen)

Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2009 – 2010 (Persen)

Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 dan 2009

Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota

Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Kepulauan Riau (%), Tahun 2010-2011
Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008-2011
Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2011
Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Kepulauan Riau, 2010 - 2011
Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Kepulauan Riau (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Kepulauan Riau (Juta Rupiah), Tahun 2010
Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Gambar 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi[1] dan Nasional (%), Tahun 2006-2010

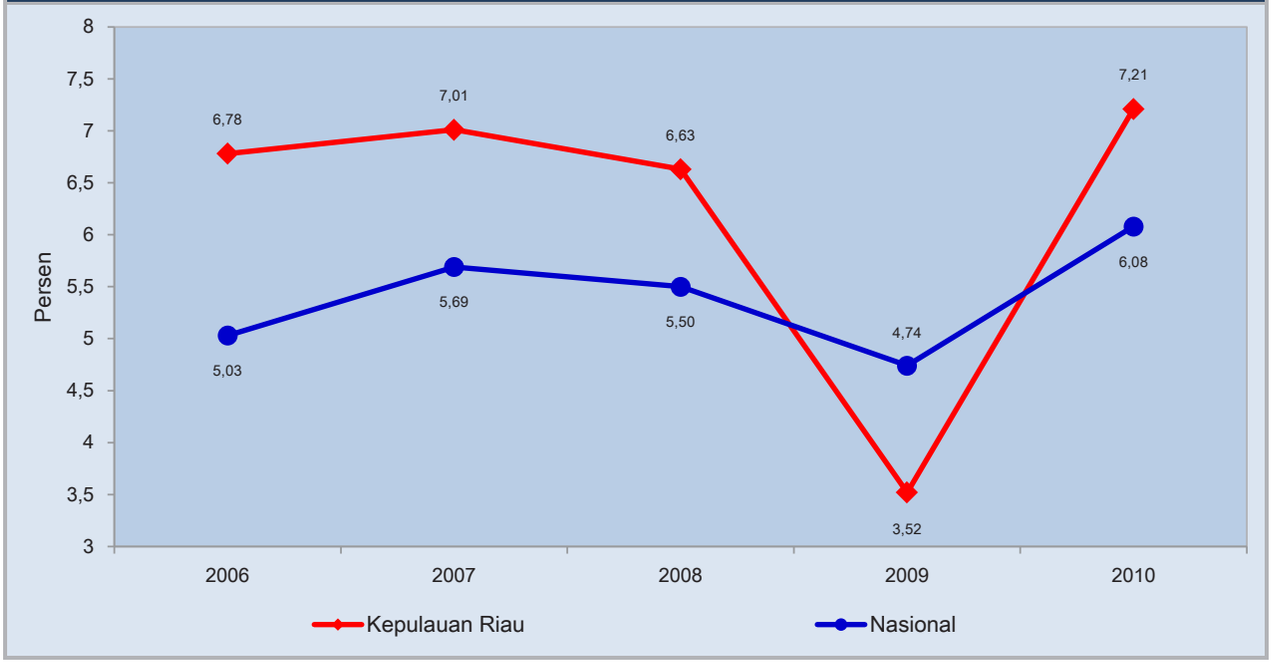

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010

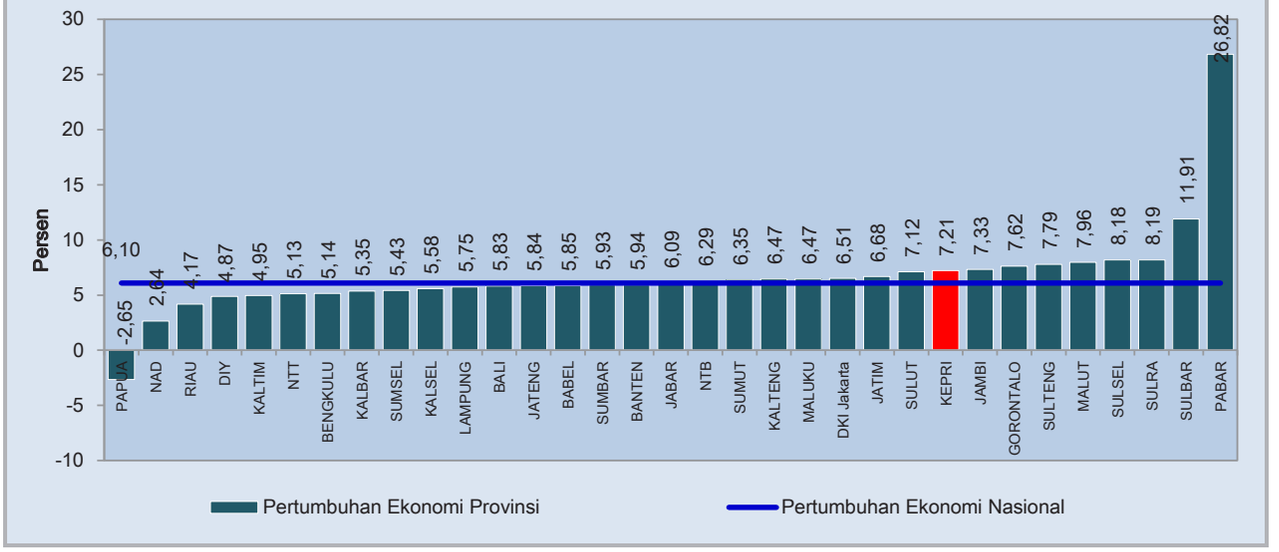

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

[1] Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	2,87	3,19	3,43	1,70	1,73	1,80	3,80	1,50	4,20
Pertambangan Dan Penggalian	5,44	5,60	5,94	2,06	2,08	2,11	-2,71	1,10	1,13
Industri Pengolahan	26,62	29,52	33,49	19,06	19,51	20,88	4,56	2,36	7,06
Listrik. Gas & Air Bersih	0,33	0,35	0,40	0,20	0,20	0,22	7,94	2,13	8,24
Bangunan	3,73	4,54	5,28	1,53	1,73	1,93	34,26	13,36	11,56
Perdagangan. Hotel & Restoran	12,06	12,49	14,18	8,31	8,63	9,45	7,77	3,84	9,56
Pengangkutan & Komunikasi	2,69	2,98	3,24	1,61	1,72	1,83	14,44	6,67	6,40
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	3,24	3,45	3,72	1,73	1,83	1,92	9,71	5,50	4,99
Jasa - Jasa	1,61	1,77	1,93	0,82	0,89	0,94	15,59	8,44	5,44
Produk Domestik Regional Bruto	**58,59**	**63,89**	**71,61**	**37,02**	**38,32**	**41,08**	**6,63**	**3,52**	**7,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2009-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2009 Februari	2009 Agustus	2010 Februari	2010 Agustus
Pertanian	84.626	82.782	88.439	98.091
Pertambangan Dan Penggalian	6.737	9.588	4.786	11.855
Industri Pengolahan	223.902	157.600	208.080	252.753
Listrik. Gas & Air Bersih	2.490	3.775	3.341	3.301
Bangunan	43.232	38.098	29.932	50.833
Perdagangan. Hotel & Restoran	99.241	139.680	122.627	153.505
Pengangkutan & Komunikasi	45.108	62.483	42.557	55.979
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	13.303	15.257	18.227	16.626
Jasa - Jasa	97.634	117.193	135.023	126.543
Jumlah	**616.273**	**626.456**	**653.012**	**769.486**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2009-2010 (Persen)

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)		Distribusi Tenaga Kerja	
	2009	2010	2009	2010
Pertanian	4,51	4,38	13,21	12,75
Pertambangan Dan Penggalian	5,44	5,13	1,53	1,54
Industri Pengolahan	50,91	50,83	25,16	32,85
Listrik. Gas & Air Bersih	0,53	0,53	0,60	0,43
Bangunan	4,52	4,70	6,08	6,61
Perdagangan. Hotel & Restoran	22,52	23,01	22,30	19,95
Pengangkutan & Komunikasi	4,49	4,45	9,97	7,27
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	4,78	4,68	2,44	2,16
Jasa - Jasa	2,33	2,29	18,71	16,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 3
Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010

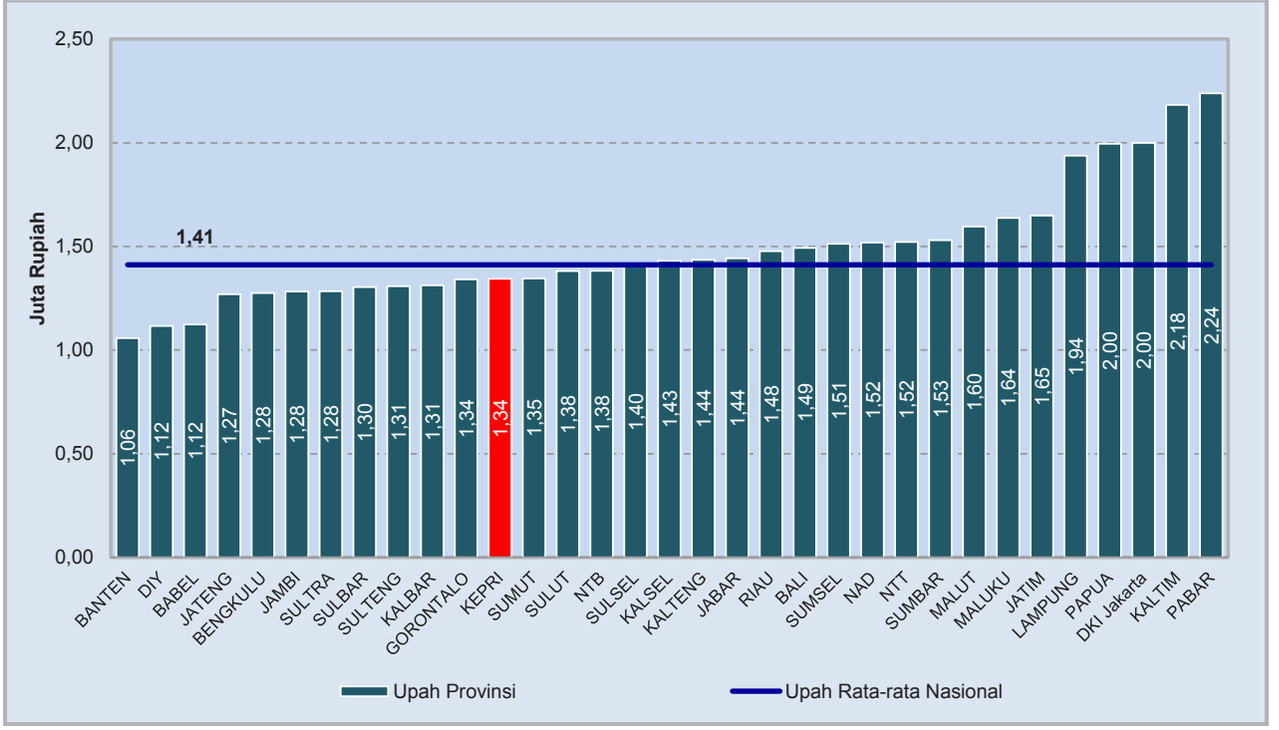

Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

Gambar 4
Perkembangan Inflasi Tahunan (*Year-on-Year*) Provinsi Kepulauan Riau (%),
Tahun 2010-2011

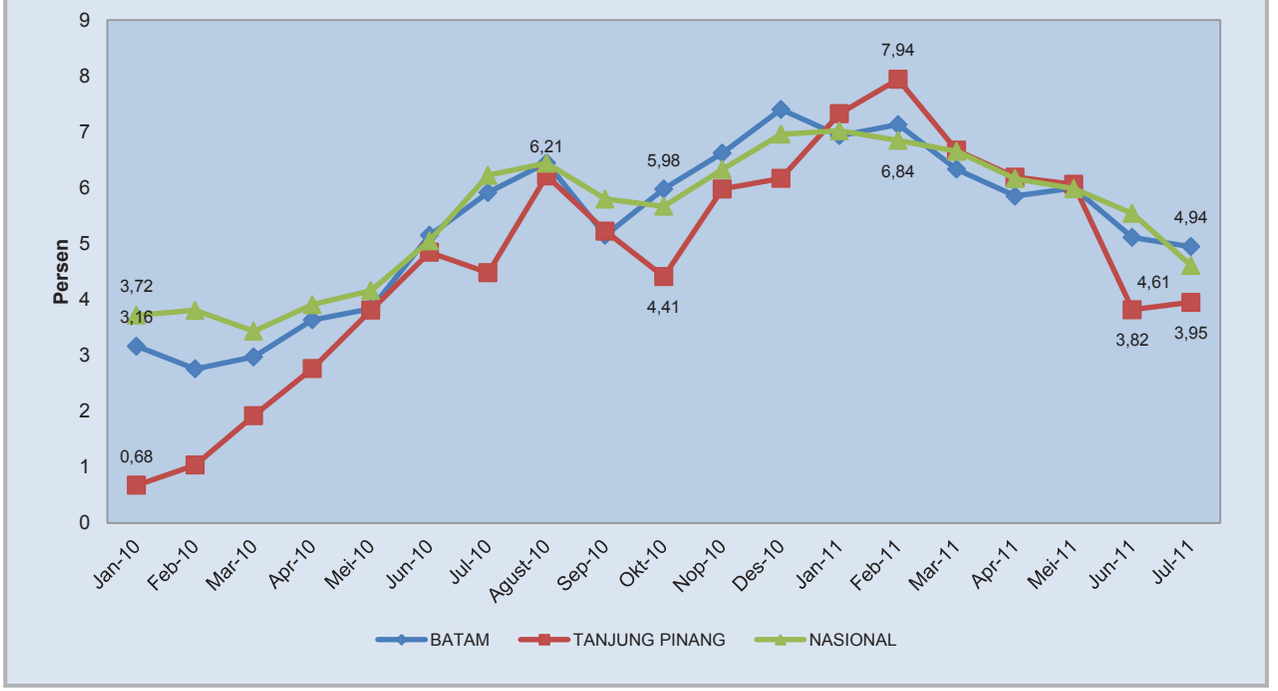

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 5
Inflasi Tahunan (*Year-on-Year*) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%),
(Bulan Juli 2011)

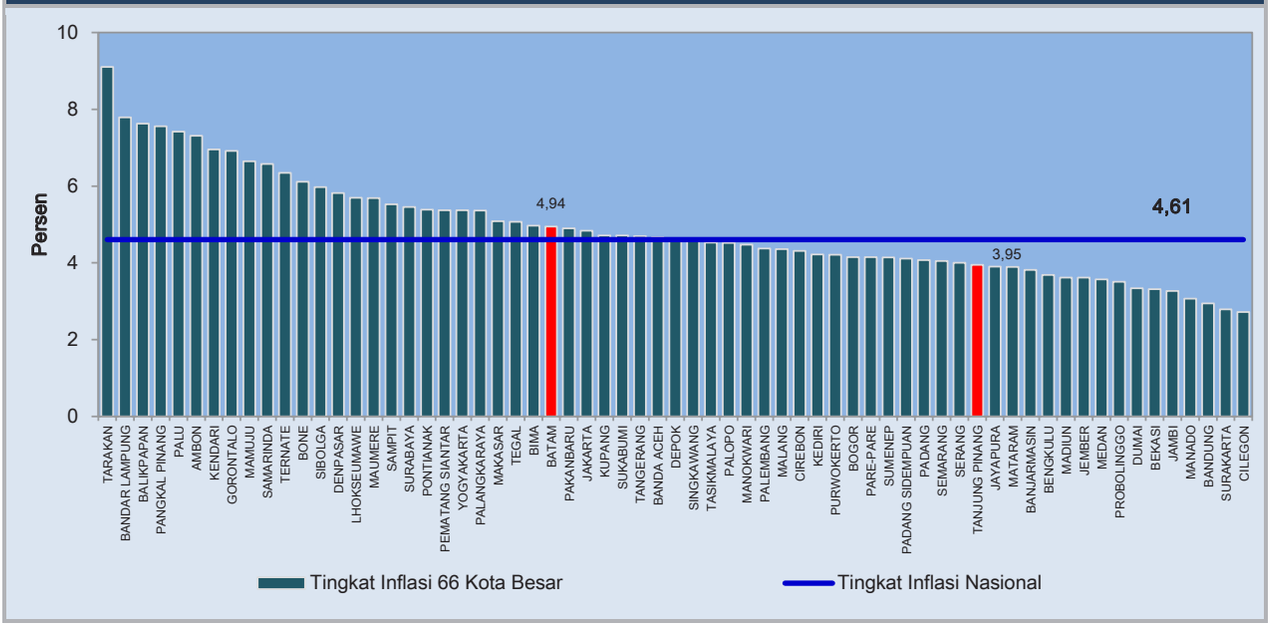

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

Gambar 6
Perkembangan Nilai Tukar Petani (*Year-on-Year*) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008-2011

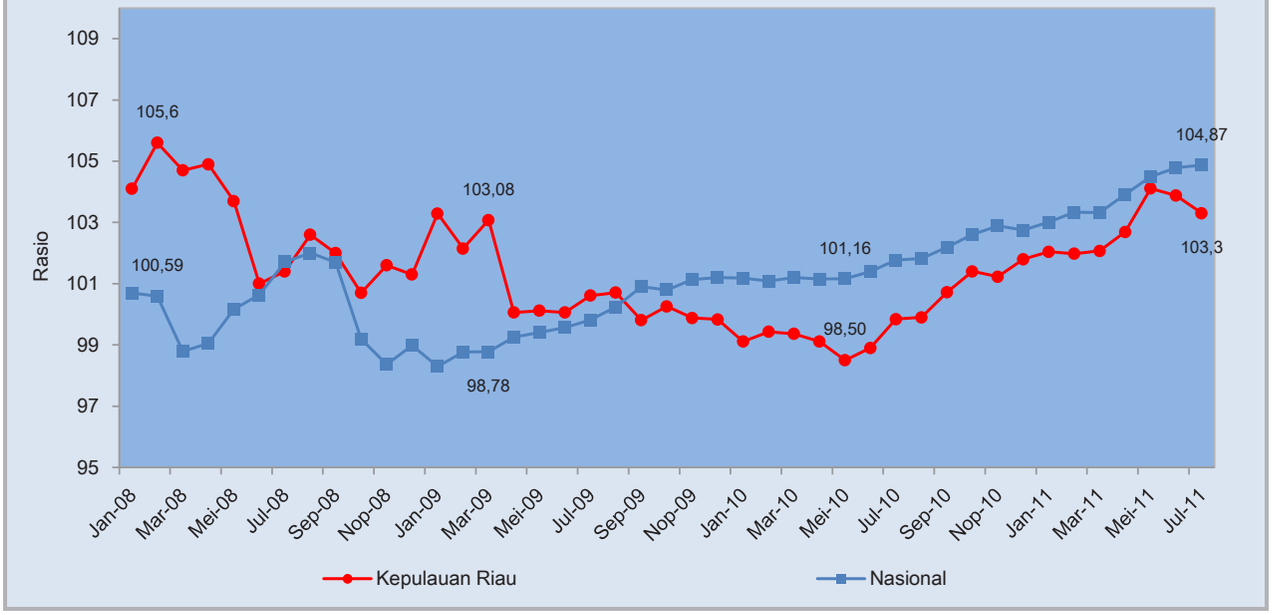

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 7
Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011

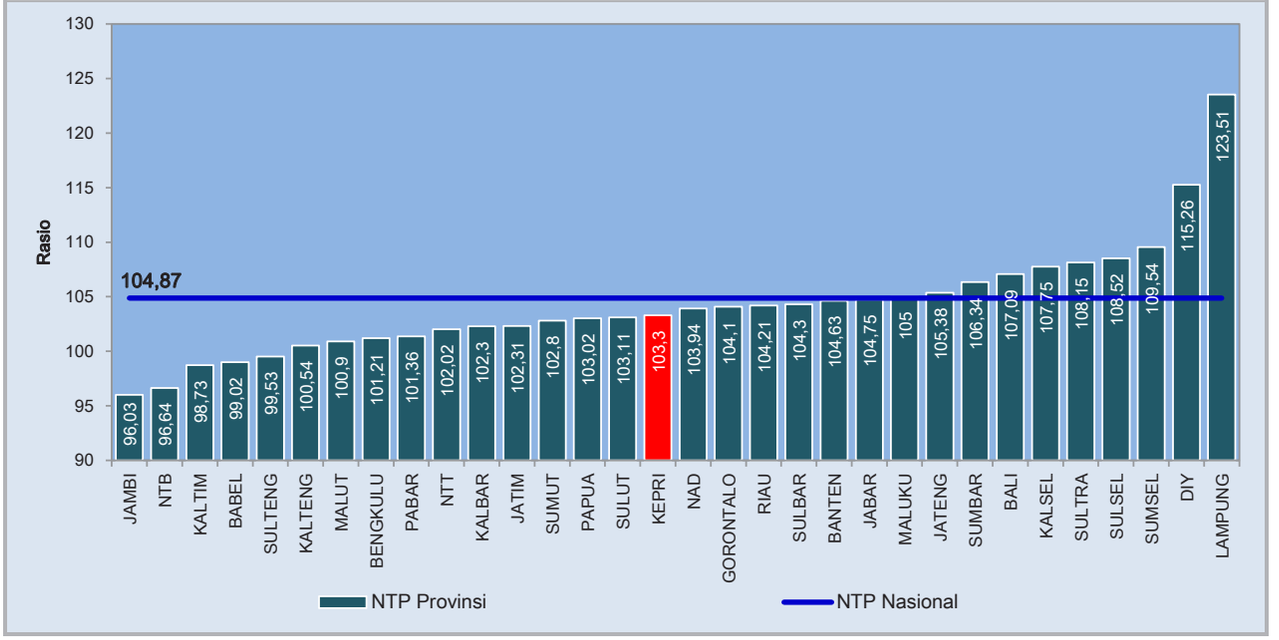

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN

Gambar 8
Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%),
Tahun 2010

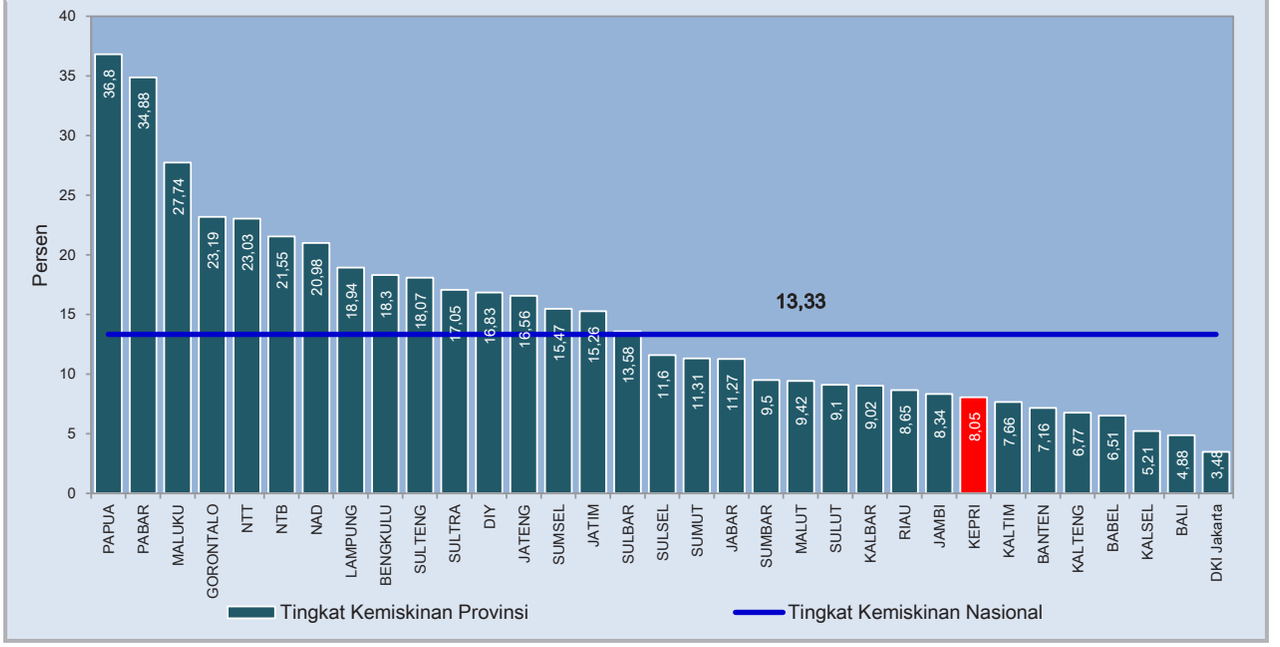

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 9
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%),
Tahun 2010

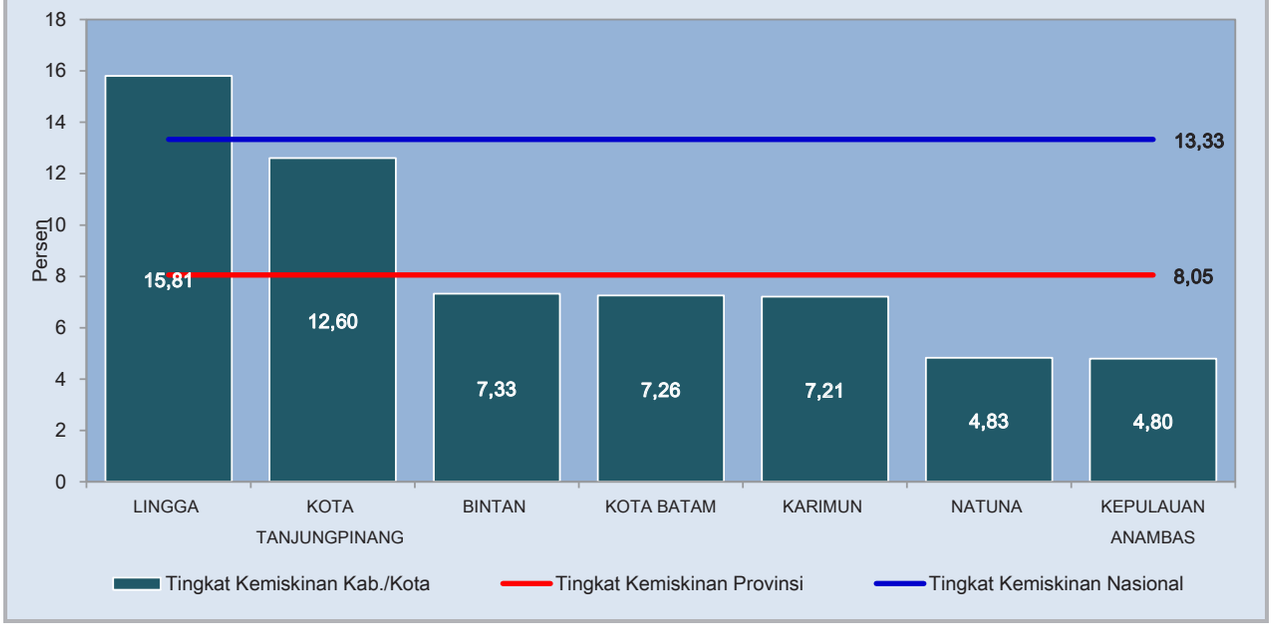

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KARIMUN	237 250	254 789	6,48	7,21	15 539	15 344
BINTAN	260 143	274 721	7,01	7,33	9 236	10 428
NATUNA	205 825	217 359	4,35	4,83	4 388	3 348
LINGGA	289 115	310 489	16,56	15,81	15 360	13 626
KEPULAUAN ANAMBAS	-	245 079	-	4,80	-	1 797
KOTA BATAM	374 186	401 849	6,76	7,26	54 777	68 889
KOTA TANJUNGPINANG	412 718	435 847	13,42	12,60	26 029	23 640
KEPULAUAN RIAU	**283 965**	**295 095**	**8,27**	**8,05**	**125 329**	**137 072**
INDONESIA	**200 262**	**211 726**	**14,15**	**13,33**	**32.530.000**	**31.023.390**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

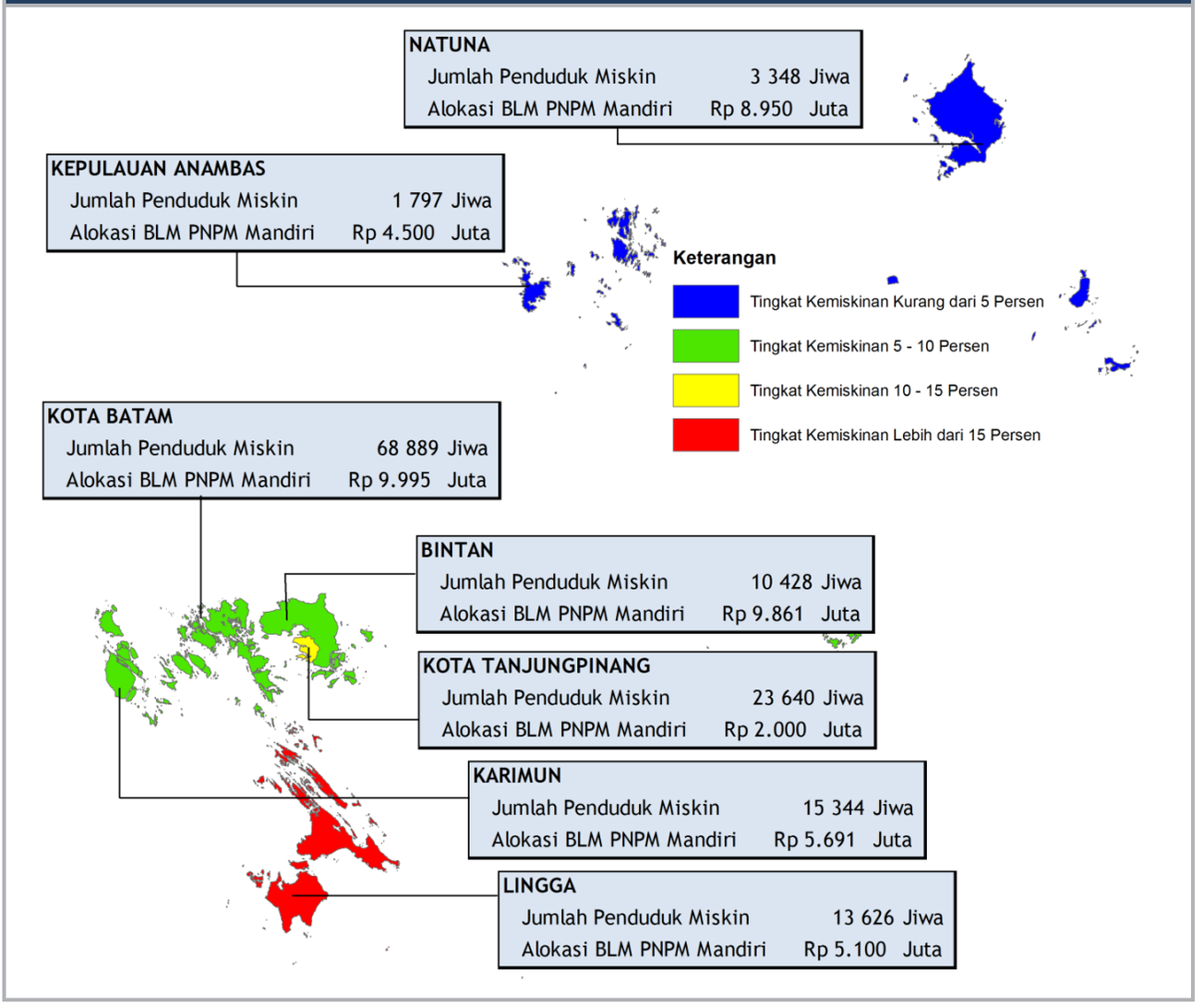

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

Gambar 11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010

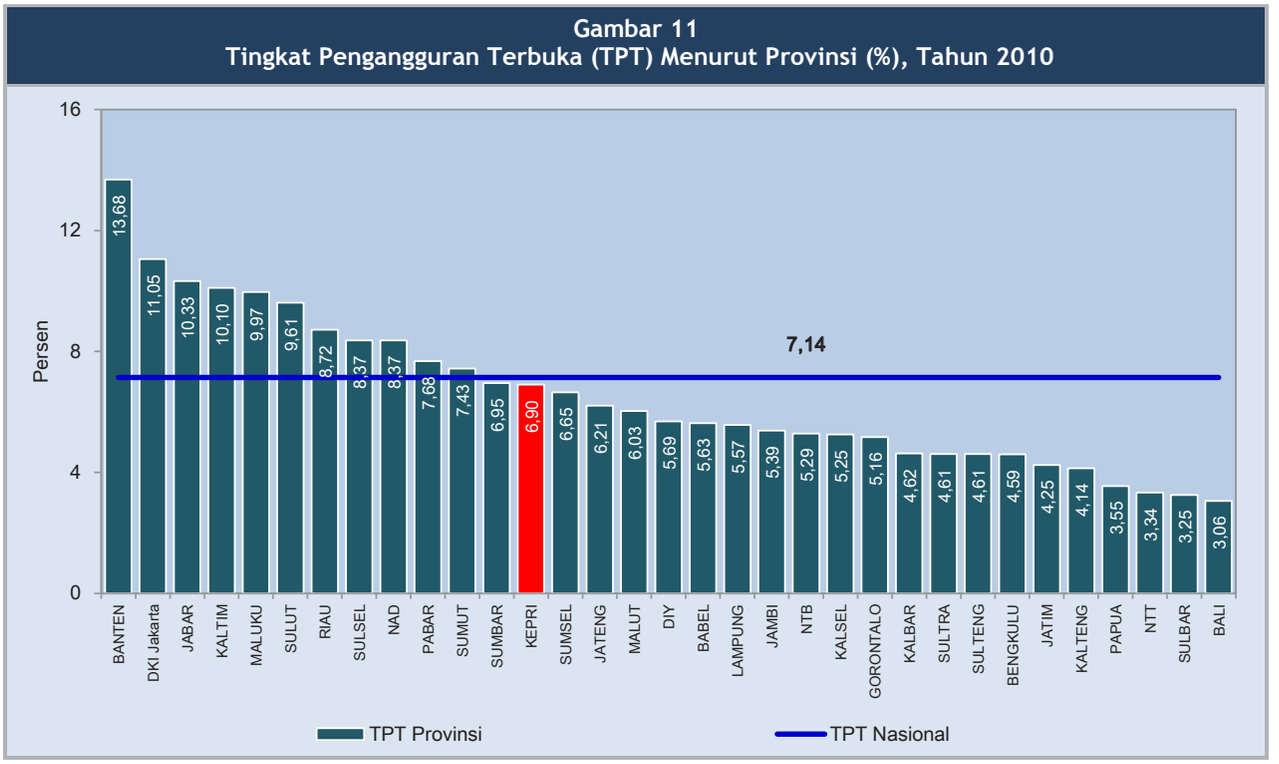

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

Gambar 12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010

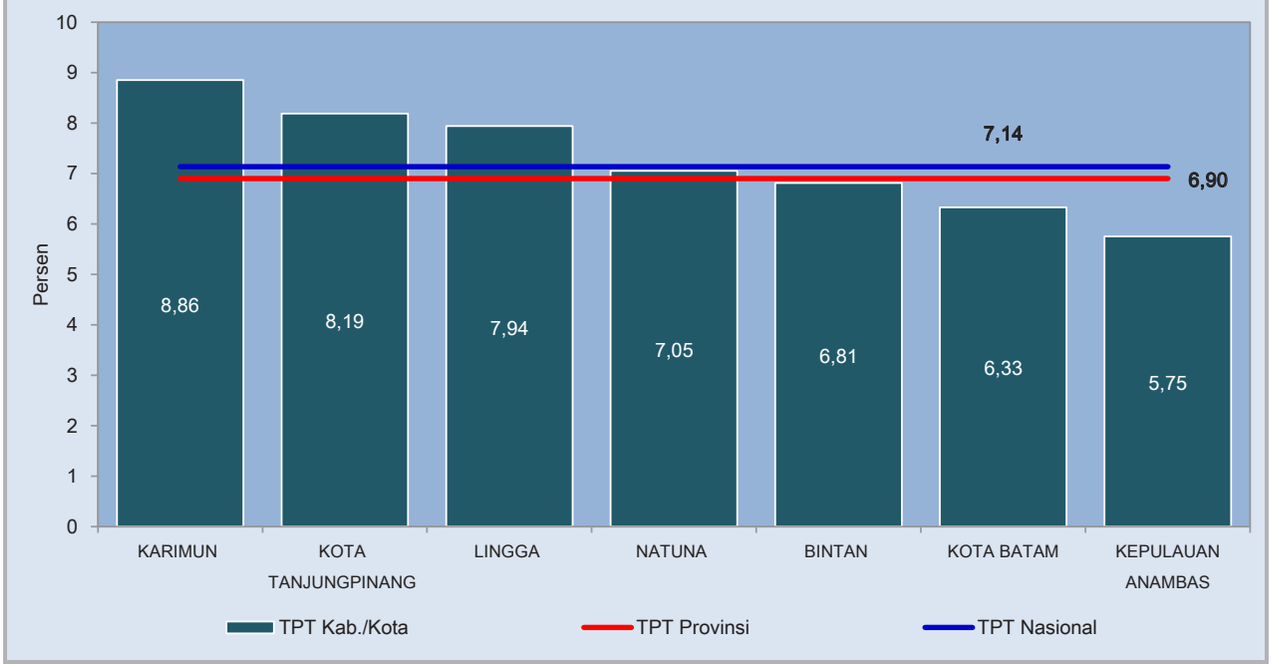

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KARIMUN	60,21	58,26	2,15	0,67	15,34	19,28	44,55	43,03
BINTAN	55,86	62,79	5,59	4,36	21,68	20,04	46,47	38,41
NATUNA	57,55	62,95	4,30	5,94	29,62	33,11	62,32	54,31
LINGGA	57,26	59,22	6,84	7,11	37,07	38,28	65,97	55,29
KEPULAUAN ANAMBAS	-	57,51	-	0,81	-	18,41	-	60,66
KOTA BATAM	69,41	75,33	1,34	1,97	7,93	9,61	23,81	21,79
KOTA TANJUNGPINANG	63,94	60,67	2,50	1,25	12,26	10,25	35,38	28,20
KEPULAUAN RIAU	**64,58**	**68,85**	**2,40**	**2,29**	**13,45**	**13,70**	**34,52**	**29,17**
NASIONAL	**67,23**	**67,72**	**4,29**	**4,11**	**30,10**	**30,75**	**61,56**	**58,96**

Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

Gambar 13
Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010

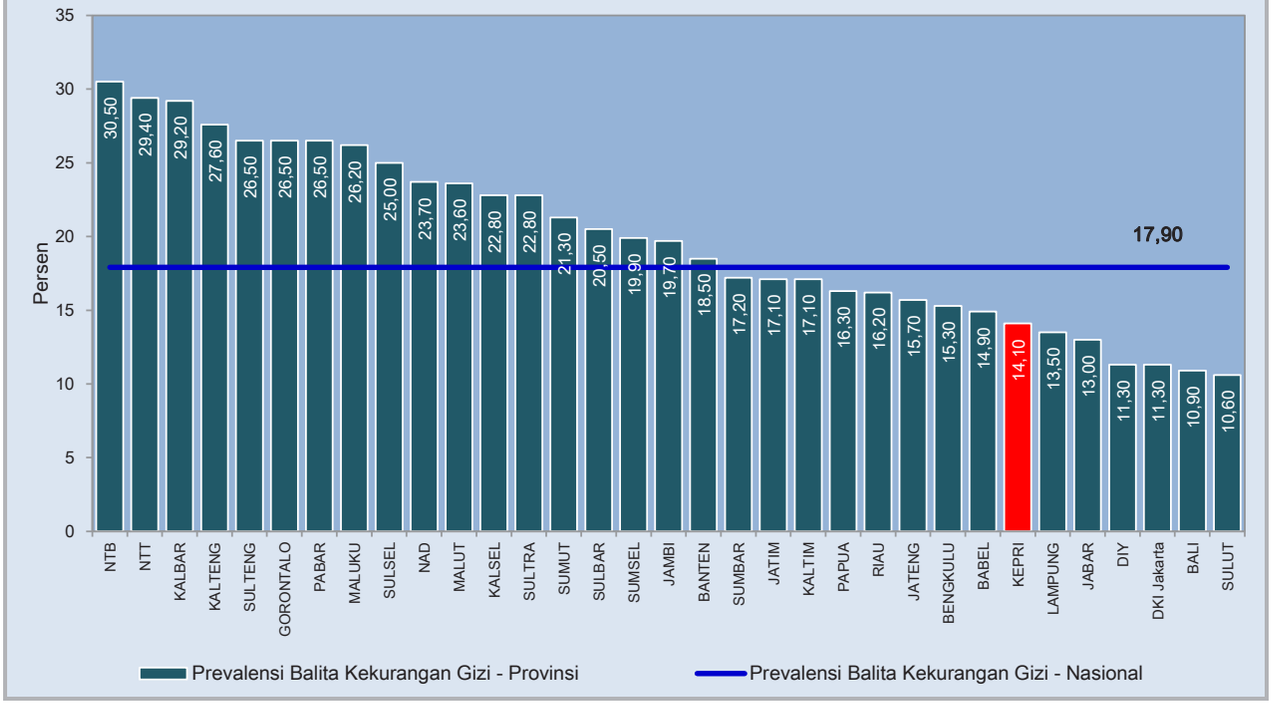

Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

Gambar 14
Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007

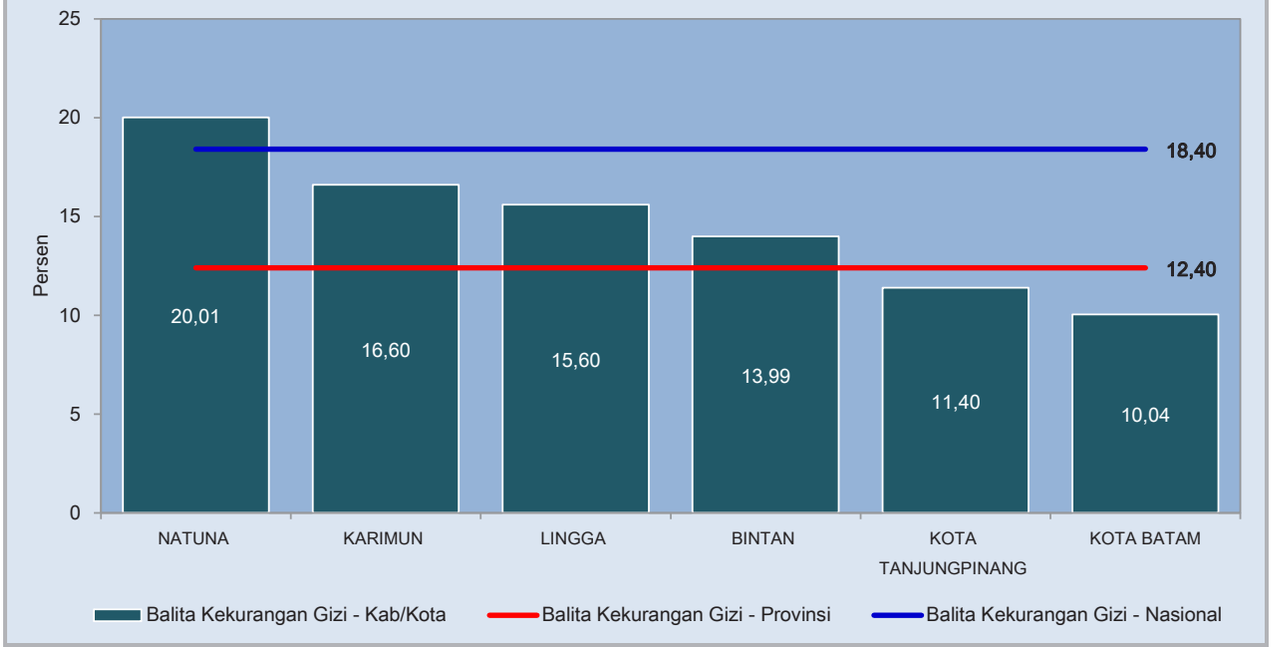

Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

Gambar 15
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009

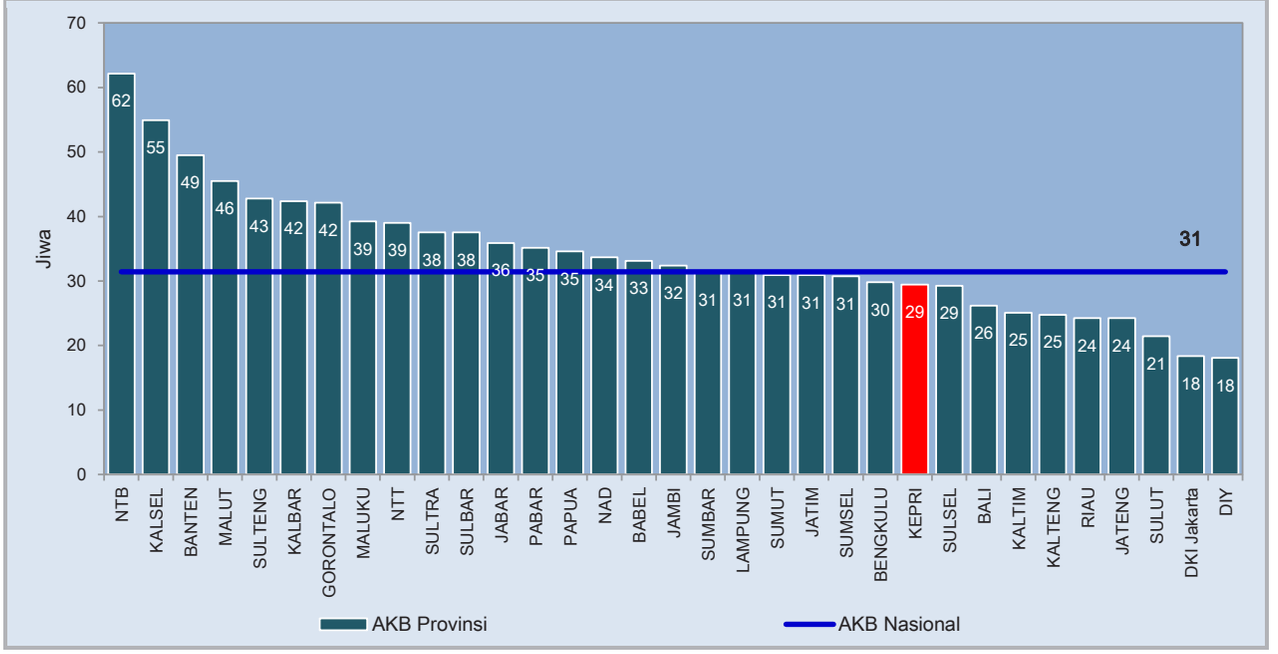

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 16
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009

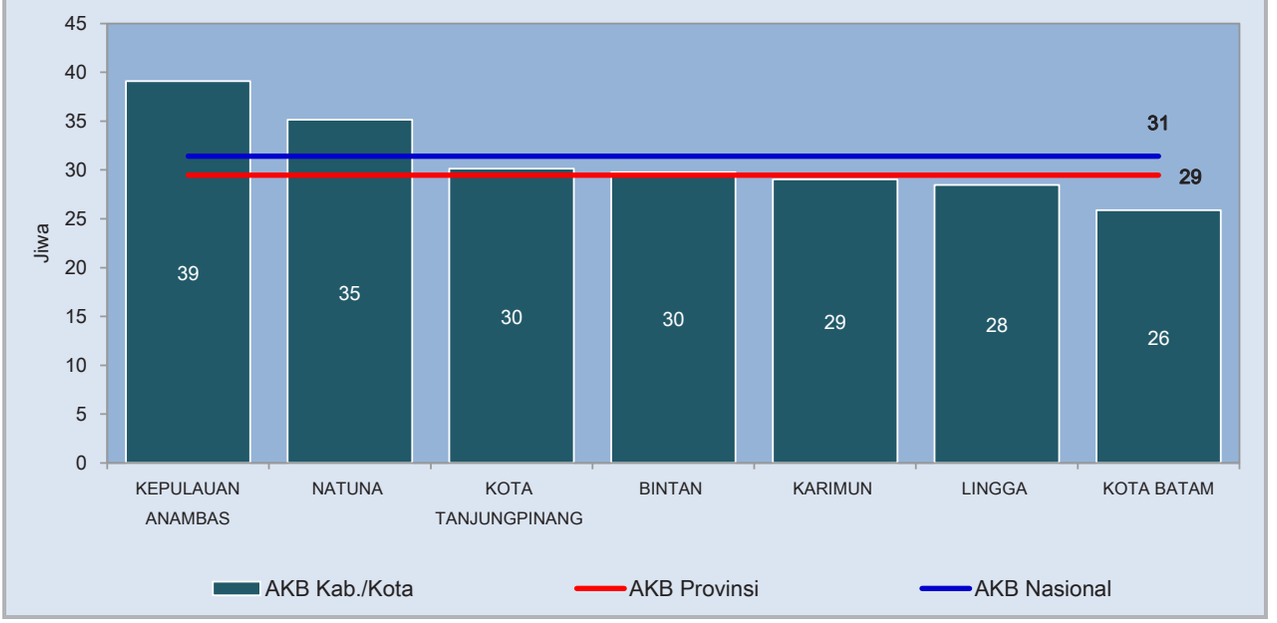

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 17
Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009

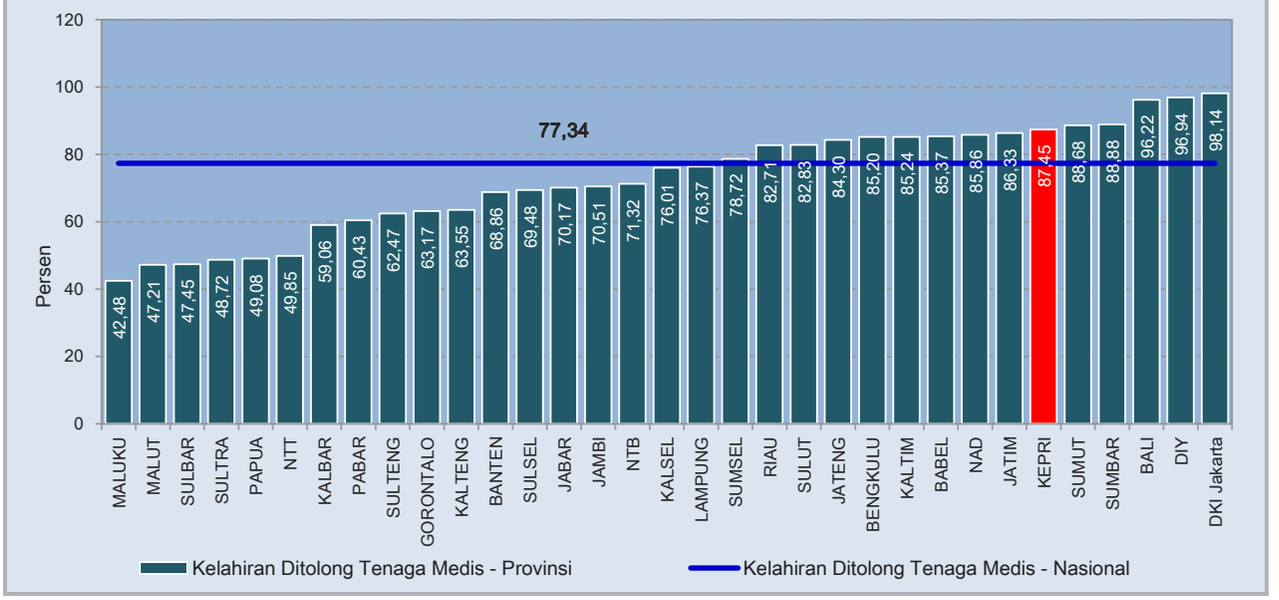

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 18
Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

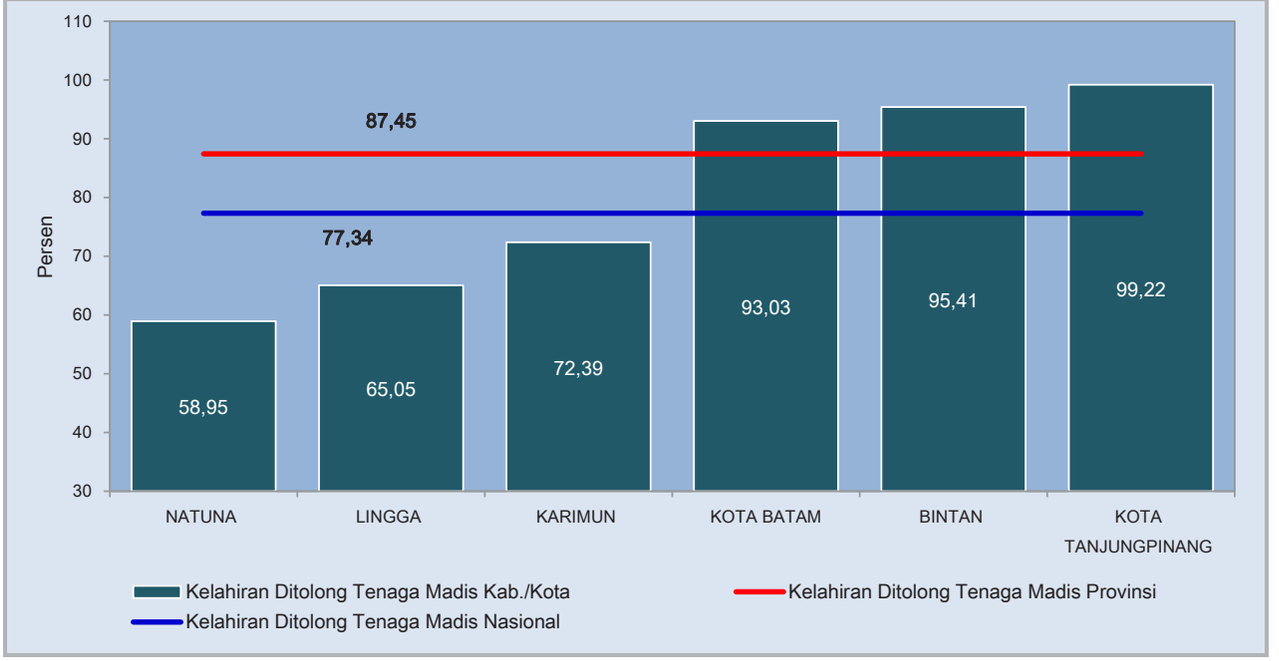

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
KARIMUN	23,61	13,98	4,30	68,93
BINTAN	29,93	20,80	5,14	76,47
NATUNA	28,56	17,54	5,42	75,27
LINGGA	51,83	37,64	5,21	73,64
KOTA BATAM	42,66	22,45	5,76	60,51
KOTA TANJUNGPINANG	33,13	20,55	5,48	70,07
KEPULAUAN RIAU	**37,14**	**21,36**	**5,45**	**65,27**
INDONESIA	**33,68**	**18,63**	**5,51**	**68,41**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 19
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009

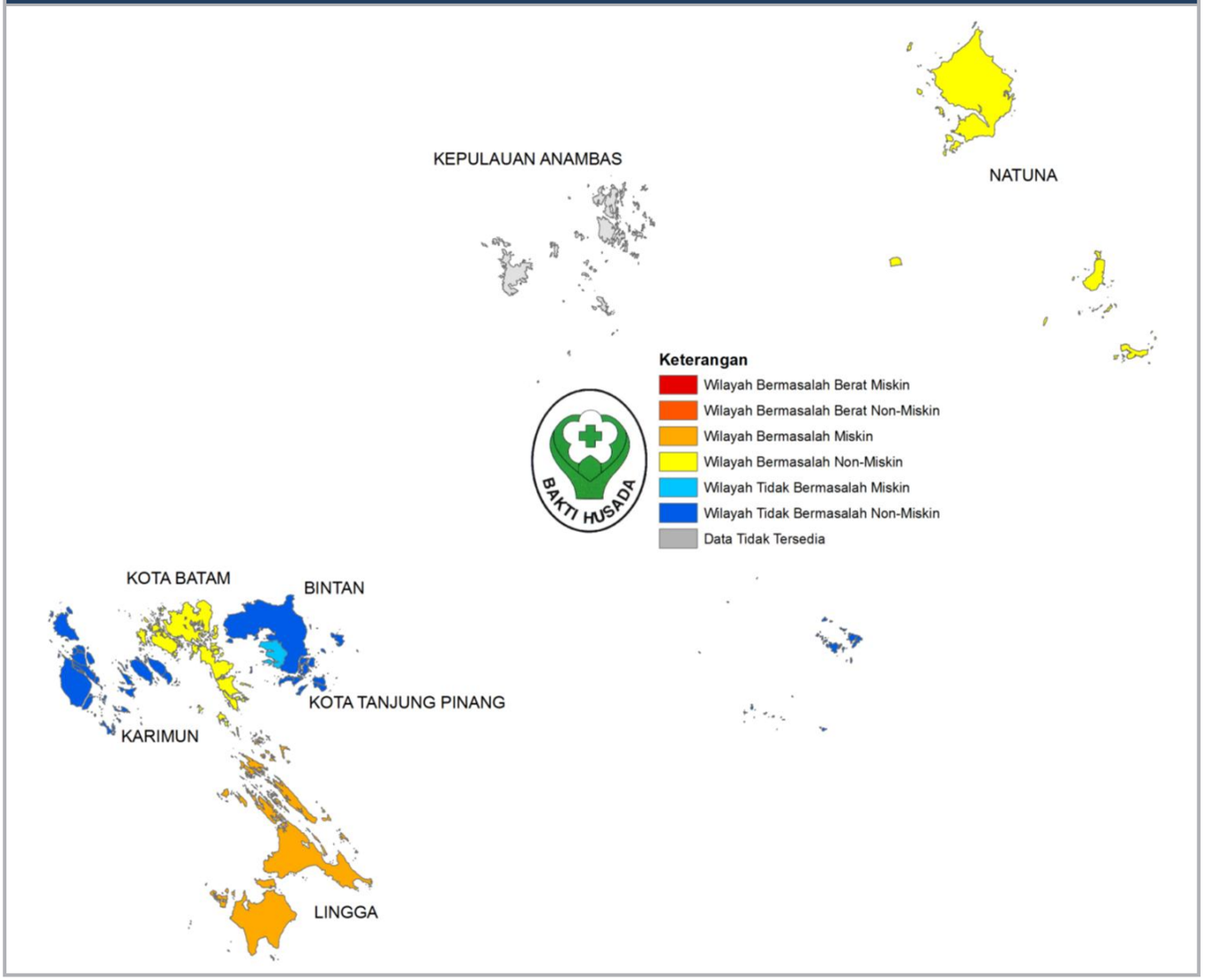

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)[2] Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
KARIMUN	KaF	93	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BINTAN	KaF	149	0,55	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
NATUNA	KaD	306	0,46	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
LINGGA	KaC	267	0,48	Kabupaten Bermasalah Miskin
KOTA BATAM	KoD	79	0,60	Kota Bermasalah Non Miskin
KOTA TANJUNG PINANG	KoE	52	0,62	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

[2] IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

Gambar 20
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

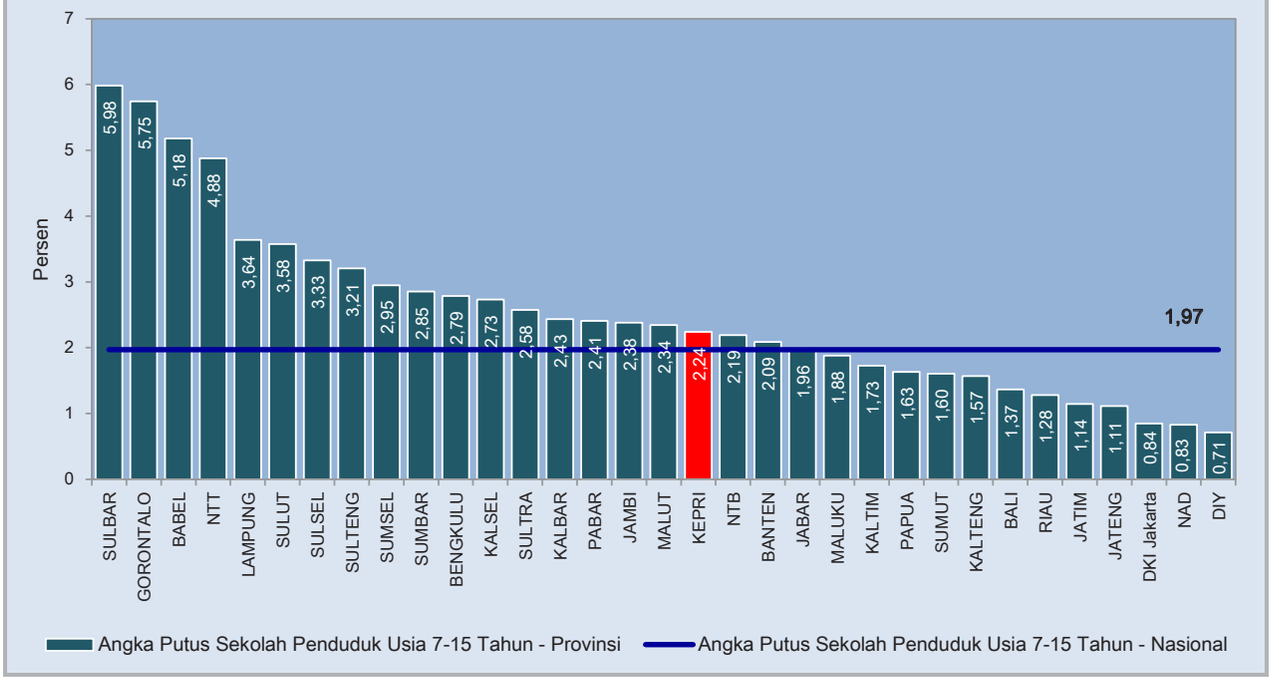

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 21
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

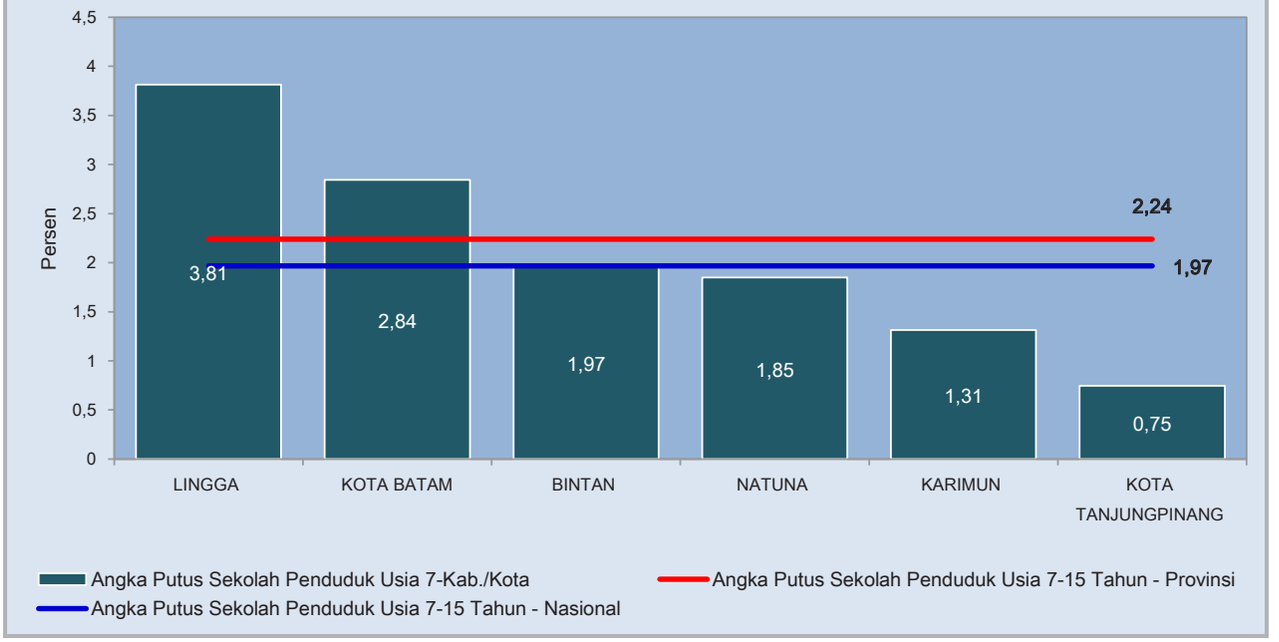

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
KARIMUN	116,39	96,35	69,21	63,96	107,17	76,79
BINTAN	108,25	91,43	91,05	71,20	80,72	61,61
NATUNA	128,71	96,48	76,05	55,28	89,39	69,45
LINGGA	107,24	89,79	80,18	63,24	84,20	49,70
KOTA BATAM	110,08	92,33	107,44	79,12	47,72	39,12
KOTA TANJUNGPINANG	119,82	98,90	73,07	70,75	96,60	69,23
KEPULAUAN RIAU	**113,44**	**93,92**	**92,15**	**72,53**	**70,75**	**53,42**
INDONESIA	**110,42**	**94,37**	**81,25**	**67,43**	**62,55**	**45,11**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Gambar 22
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi[3] (%), Tahun 2009

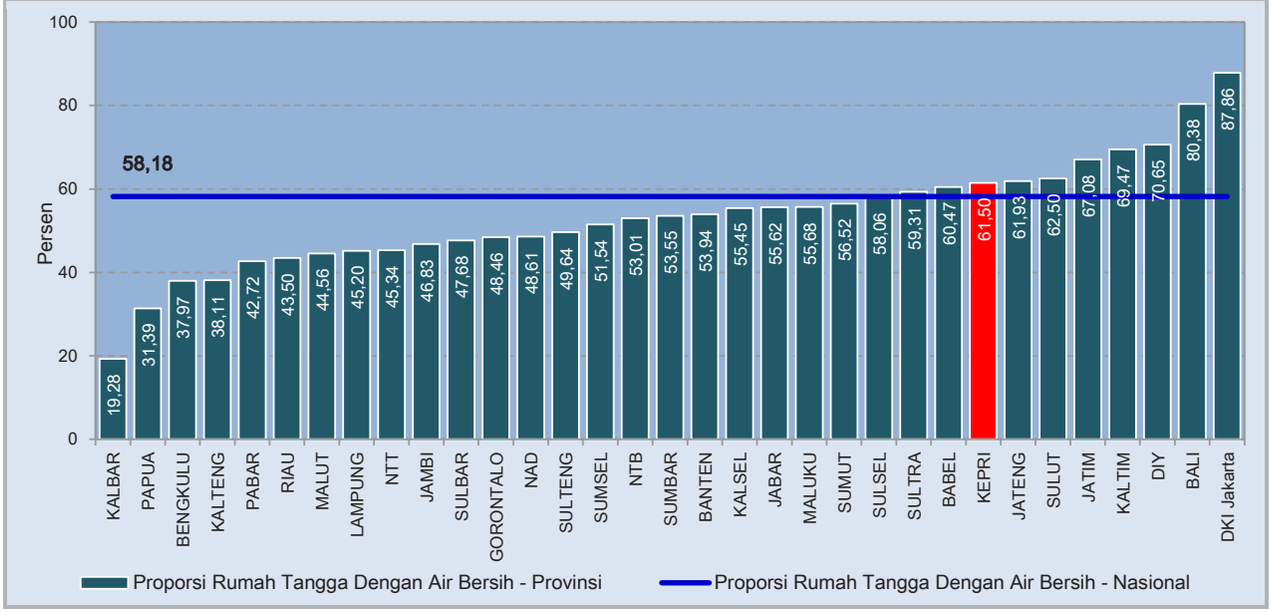

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 23
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

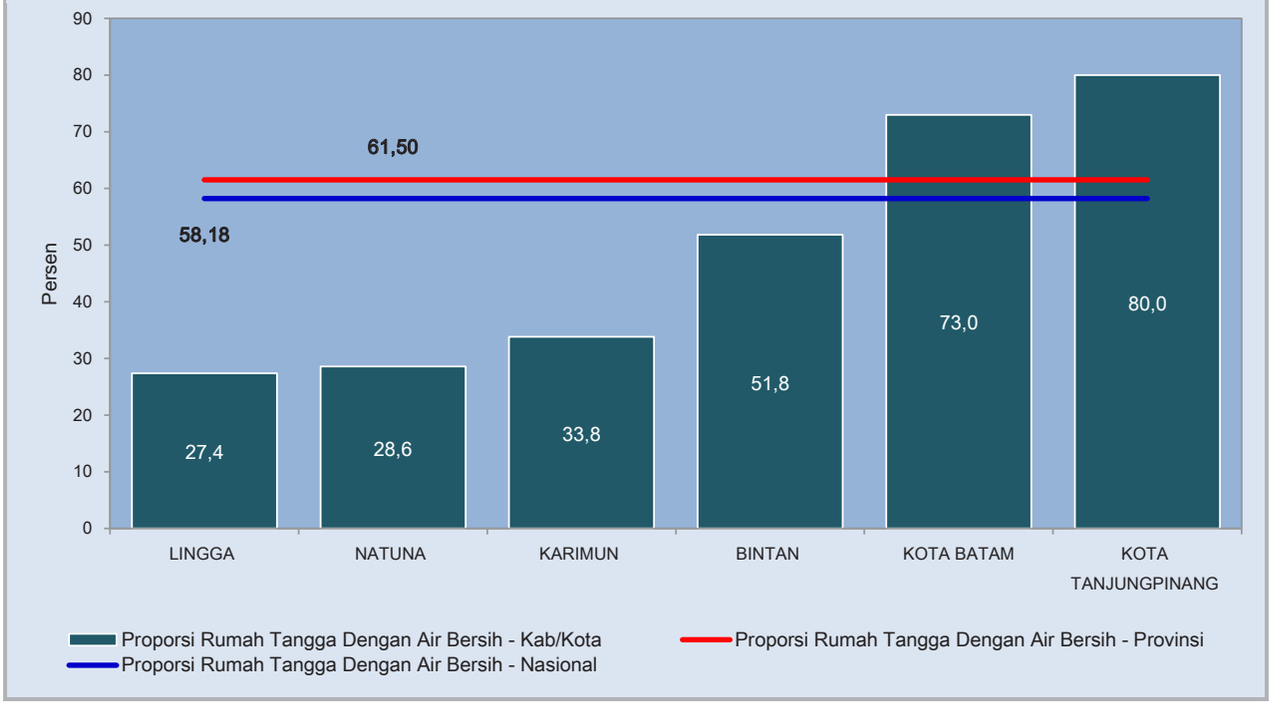

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

[3] Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

Gambar 24
Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

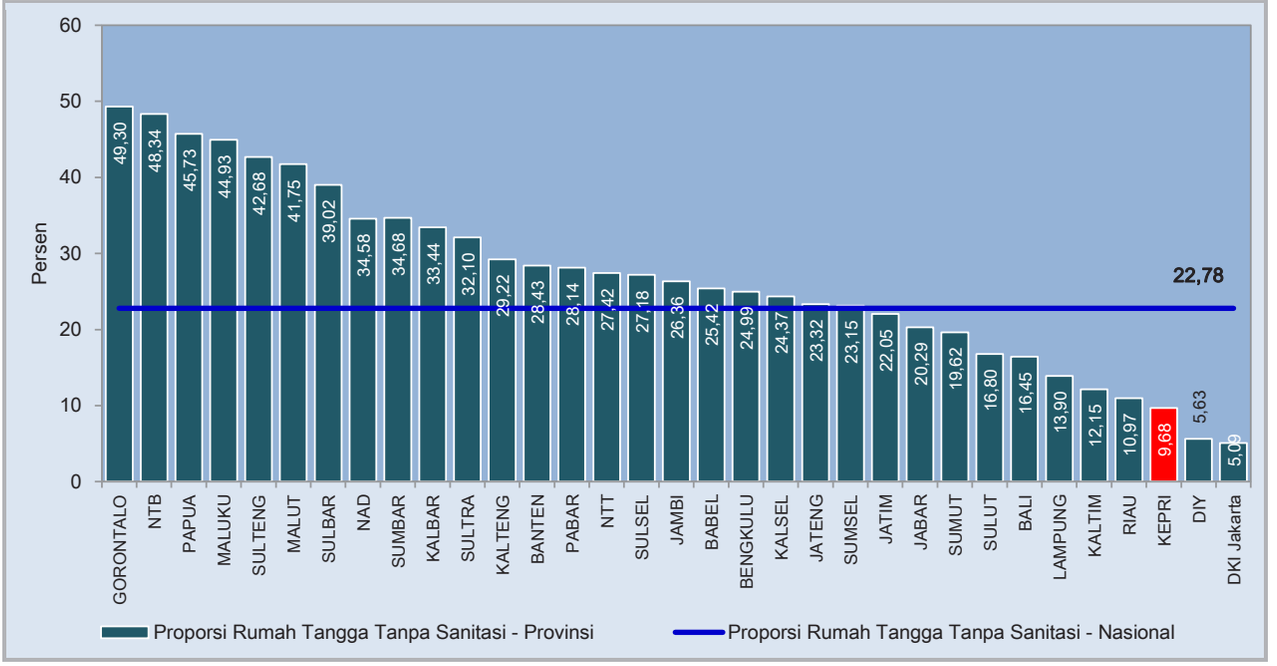

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 25.
Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

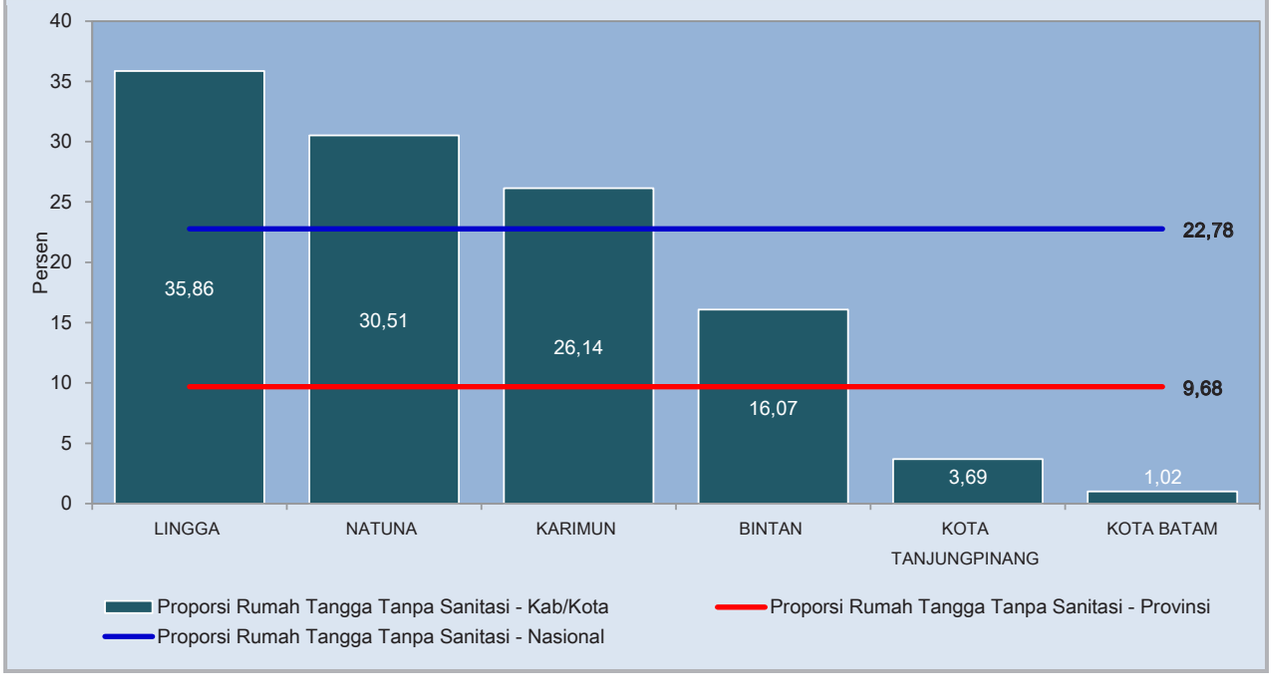

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Gambar 26
Indeks Pembangunan Manusia[4] (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2010

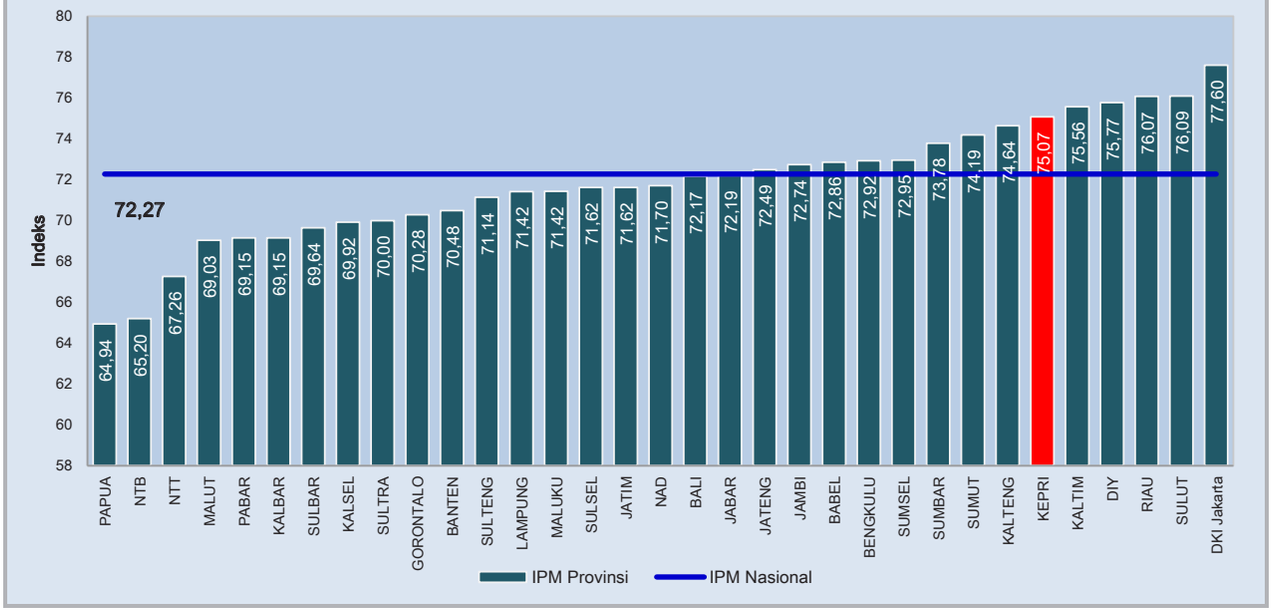

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010

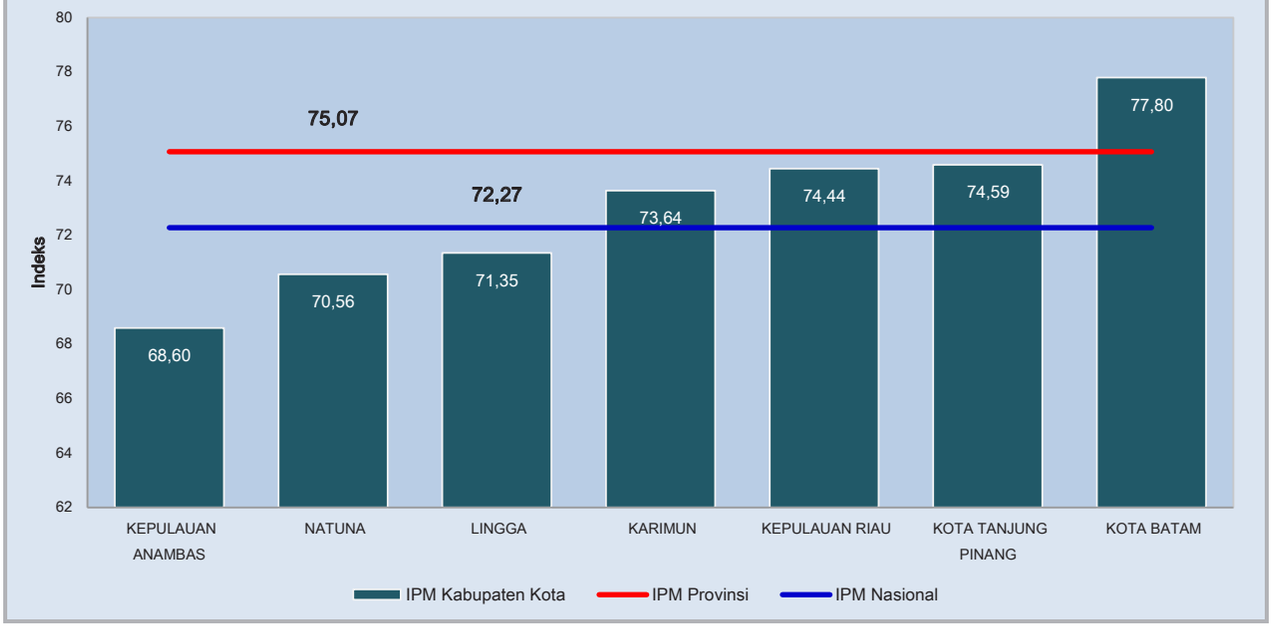

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

[4] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KARIMUN	69,86	69,91	95,19	95,82	7,81	8,09	636,34	637,79	73,15	73,64
KEPULAUAN RIAU	69,66	69,71	94,50	95,09	8,00	8,63	644,59	646,57	73,66	74,44
NATUNA	68,21	68,31	95,92	96,47	6,93	7,17	615,21	616,41	70,11	70,56
LINGGA	70,02	70,16	91,11	91,64	7,22	7,23	625,42	626,64	71,05	71,35
KEPULAUAN ANAMBAS	67,23	67,40	90,00	90,00	5,35	5,98	626,35	627,54	67,94	68,60
KOTA BATAM	70,76	70,81	98,85	98,94	10,71	10,77	648,13	650,60	77,51	77,80
KOTA TANJUNG PINANG	69,56	69,62	97,31	97,31	9,24	9,42	633,65	635,26	74,31	74,59
KEPULAUAN RIAU	**69,75**	**69,80**	**96,08**	**97,19**	**8,96**	**9,16**	**641,63**	**643,00**	**74,54**	**75,07**
INDONESIA	**69,21**	**69,43**	**92,58**	**92,91**	**7,72**	**7,92**	**631,46**	**633,64**	**71,76**	**72,27**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 28
Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita [5] Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

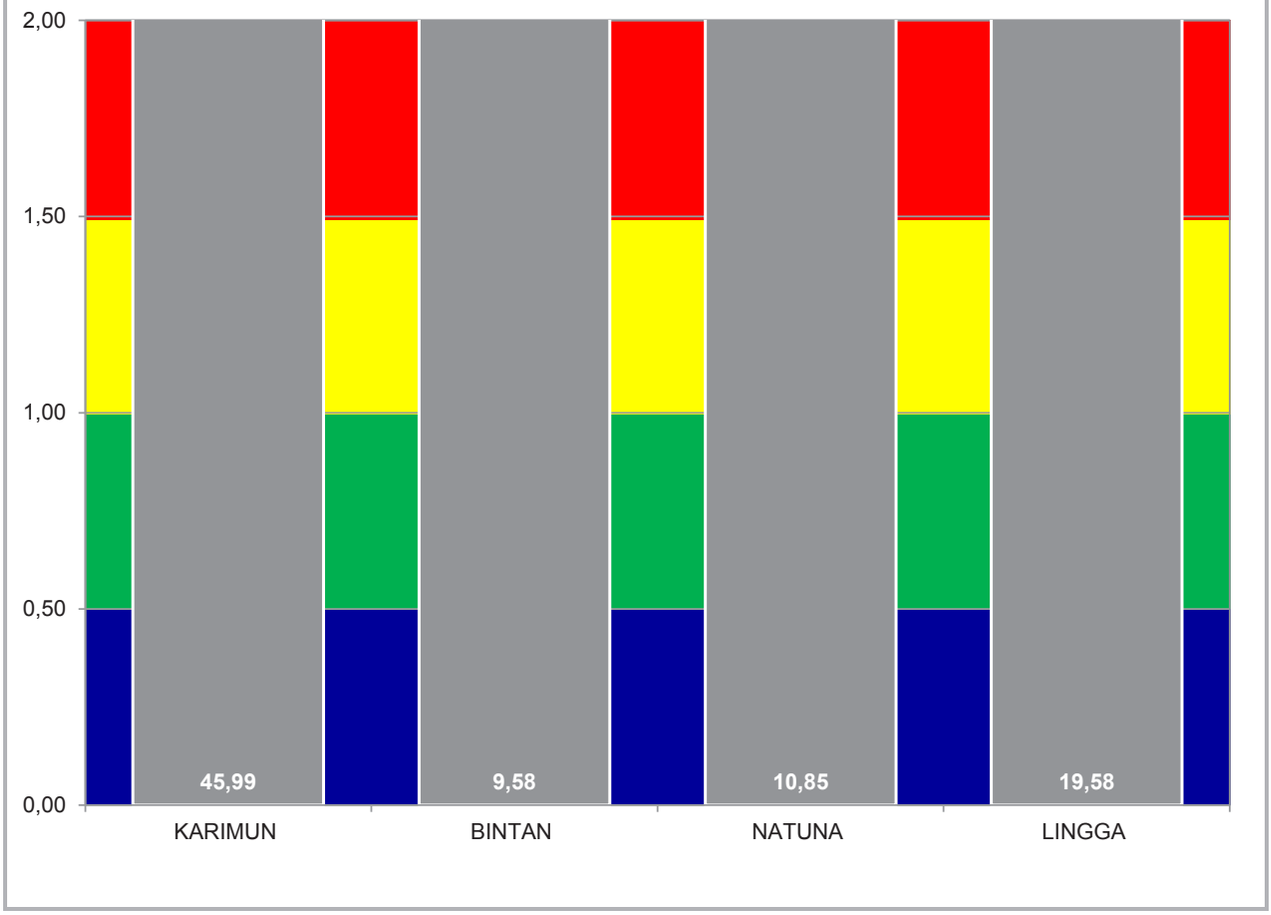

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Kepulauan Riau Dalam Angka (BPS), 2010.

Keterangan:

>1,5	Defisit Tinggi
1 – 1,5	Defisit Sedang
0,5 – 1	Surplus Rendah
0 – 0,5	Surplus Tinggi
0	Data Tidak Tersedia

[5] Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan[6] Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

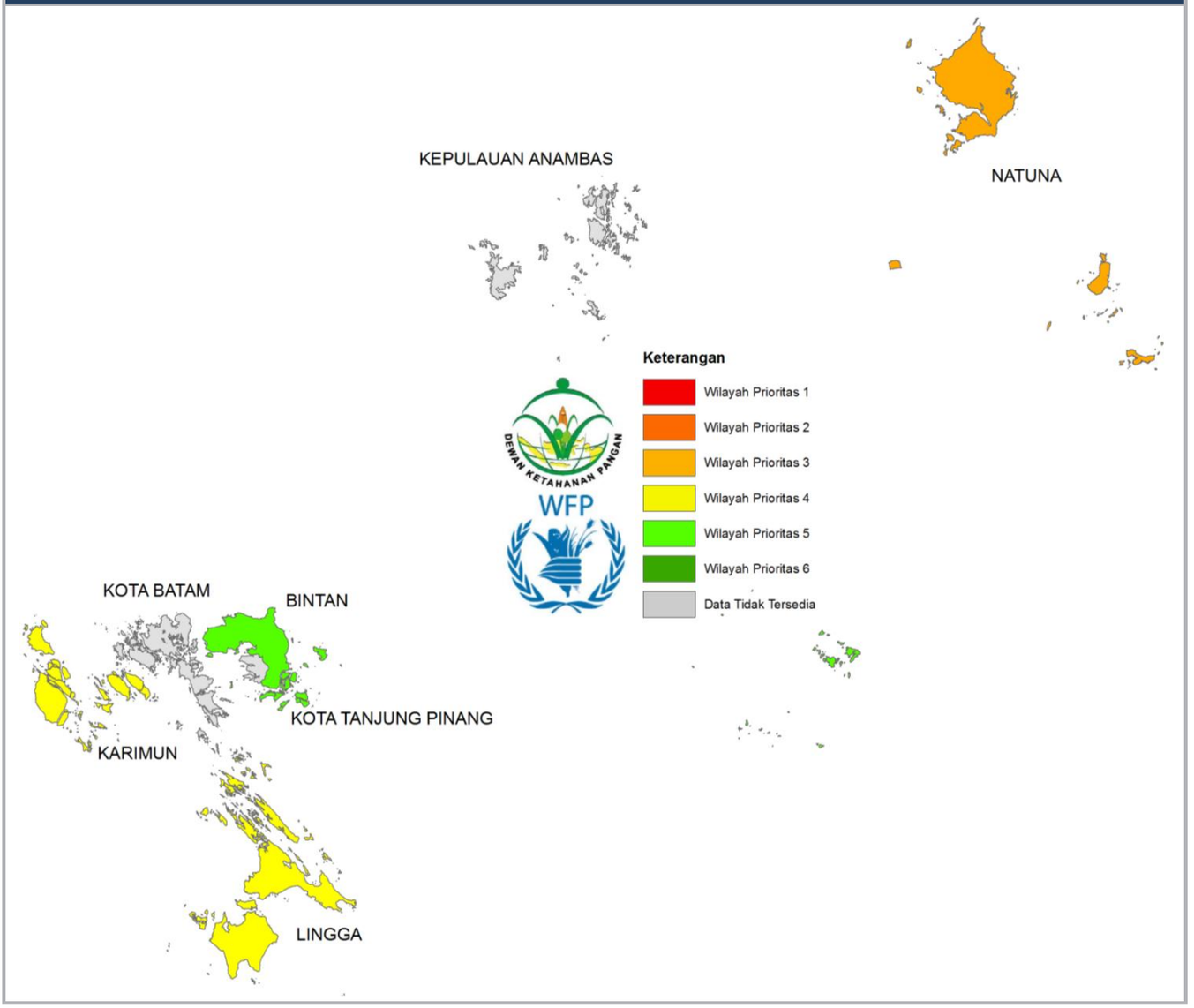

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

[6] Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
KARIMUN	7	45,99	6,48	11,03	12,96	5,57	69,86	19,8	7,41	66,21	227,4
BINTAN	31	9,58	7,01	16,61	15,69	7,67	69,66	16,7	7,84	48,20	195,2
NATUNA	28	10,85	4,35	17,98	15,05	5,81	68,21	24,6	11,83	71,42	285,2
LINGGA	15	19,58	16,56	26,57	39,13	10,84	70,02	17,9	10,87	72,64	283,5
KEPULAUAN ANAMBAS***							67,23				53,9
KOTA BATAM**			6,76	3,83	21,88	7,16	70,76	14,6	0,00	27,04	107,6
KOTA TANJUNGPINANG**			13,42	0,18	0,00	3,57	69,56	15,7	0,00	20,03	82,4

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.
Keterangan:
*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah
** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI -Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.
*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

Gambar 30
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun

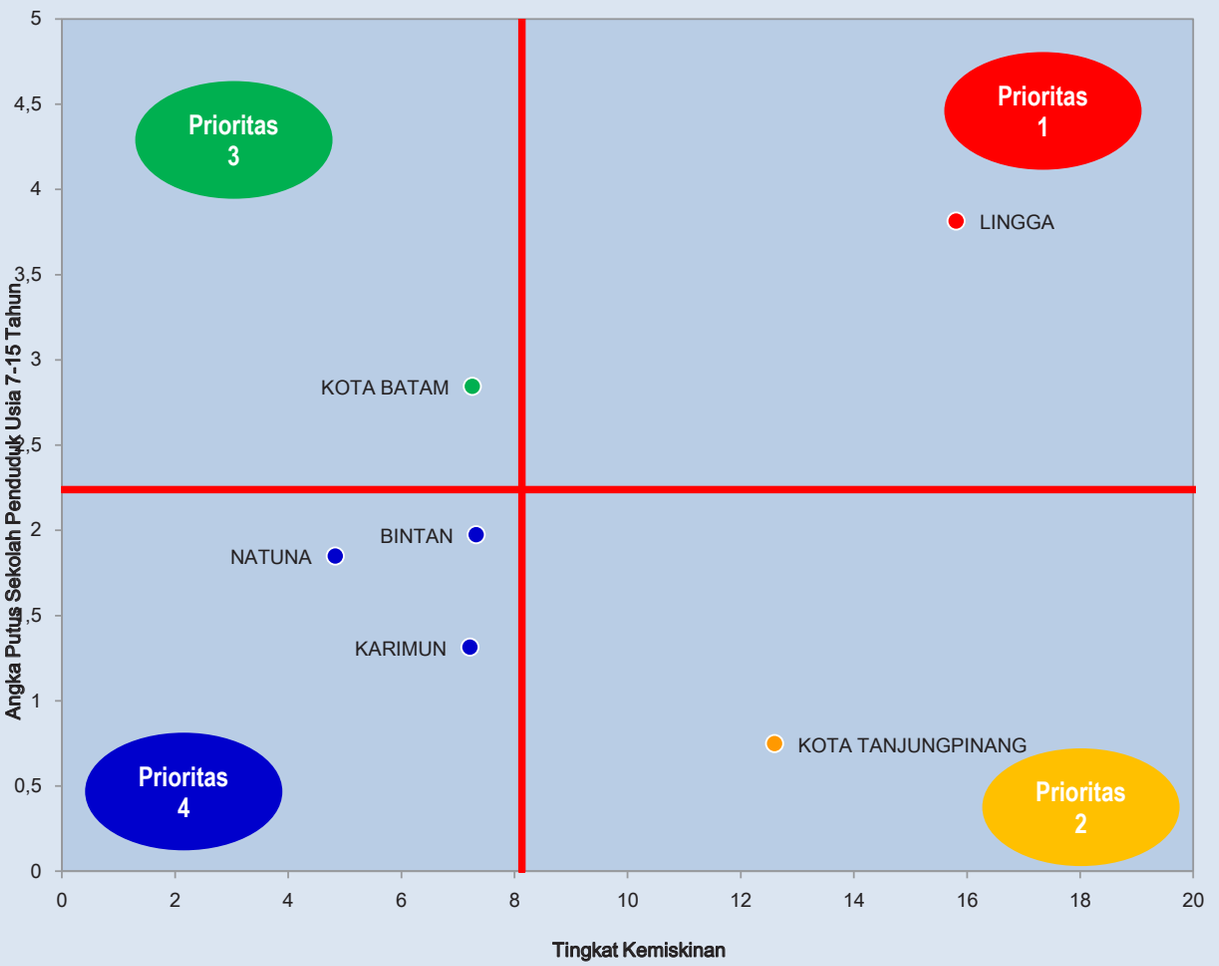

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. **Kabupaten Lingga** merupakan wilayah Prioritas Pertama.

Gambar 31
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)

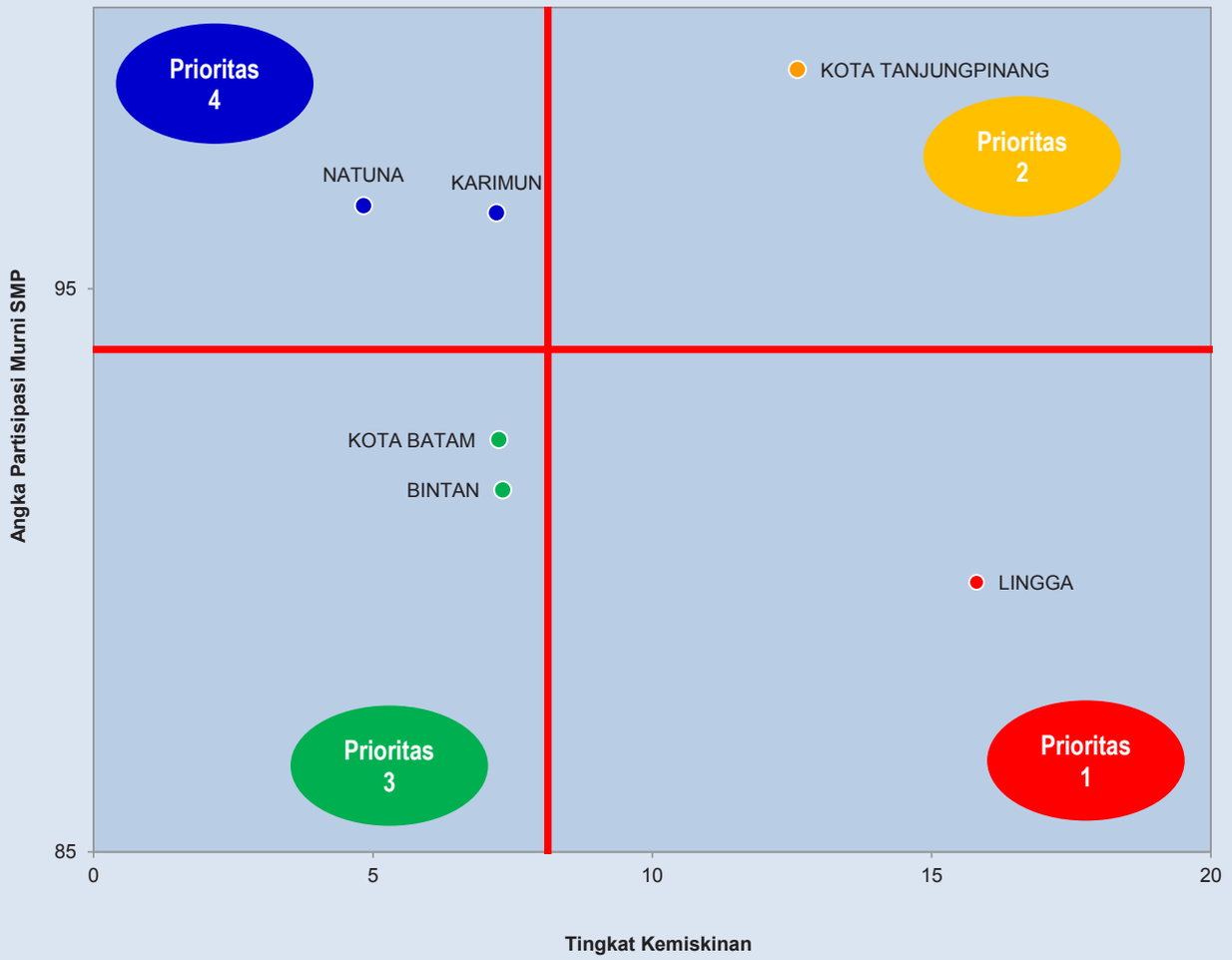

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SD/MI rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Lingga**.

Gambar 32
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

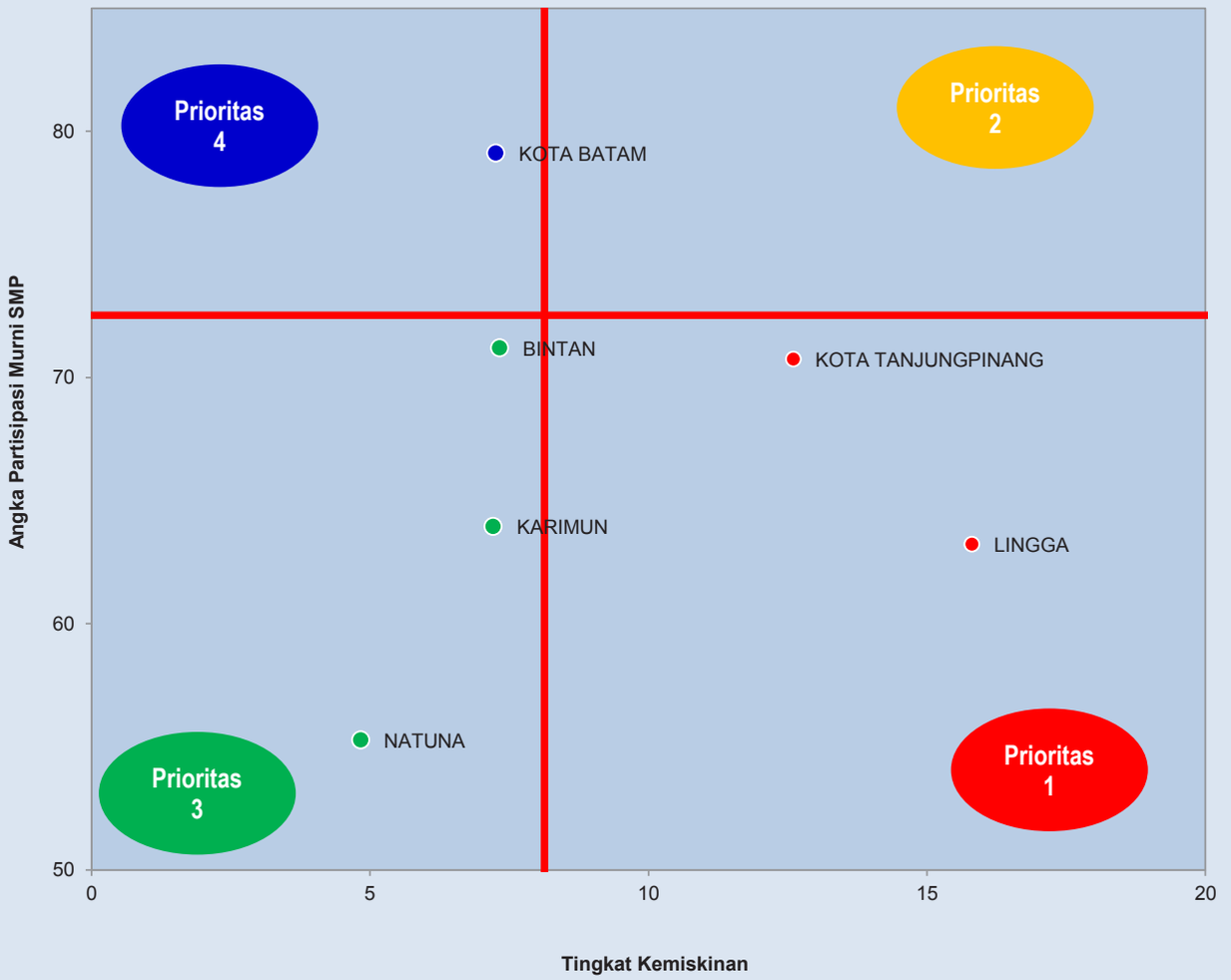

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang.**

Gambar 33
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi

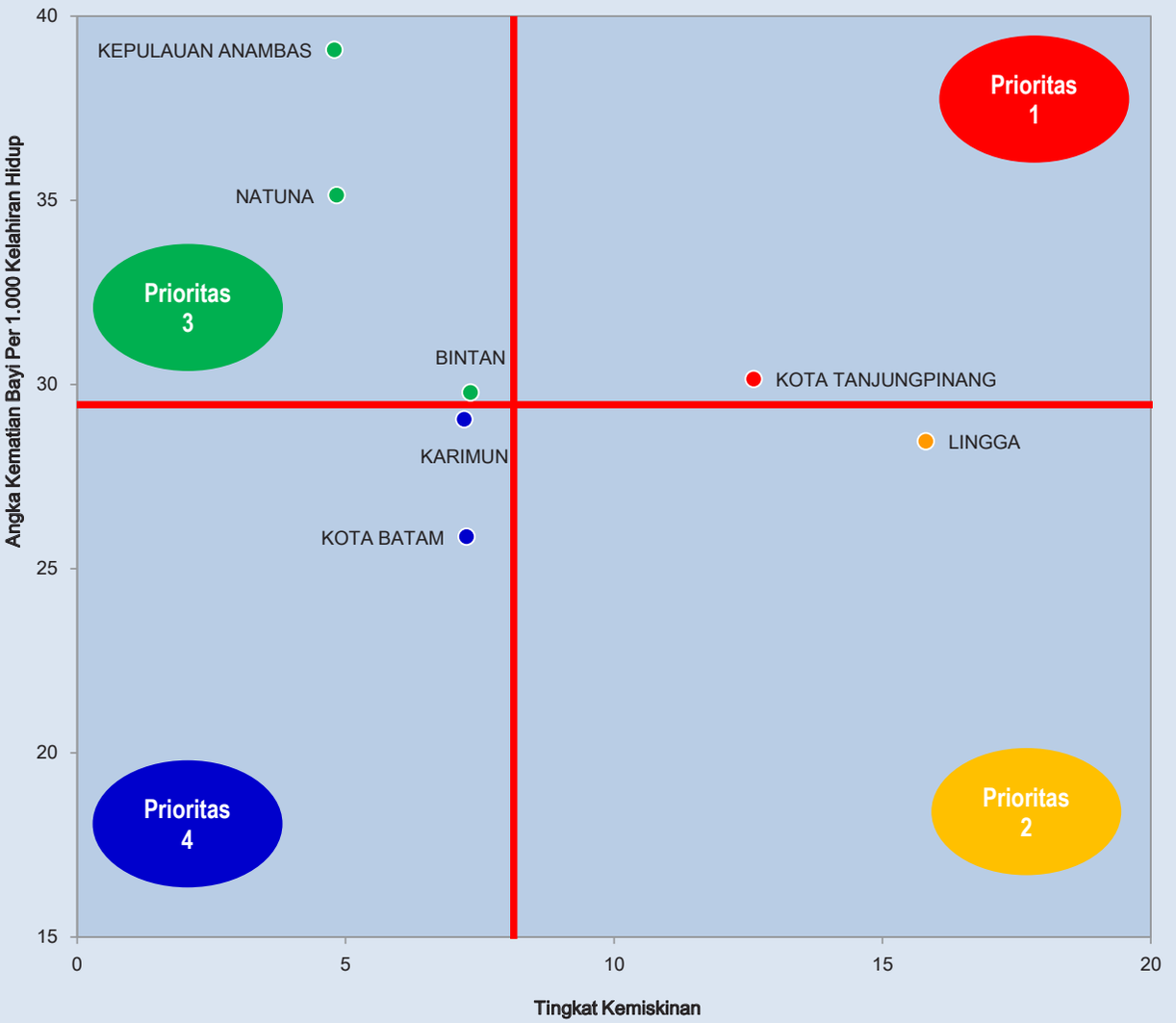

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKB dengan target kelahiran yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah tersebut adalah: **Kota Tanjung Pinang.**

Gambar 34
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

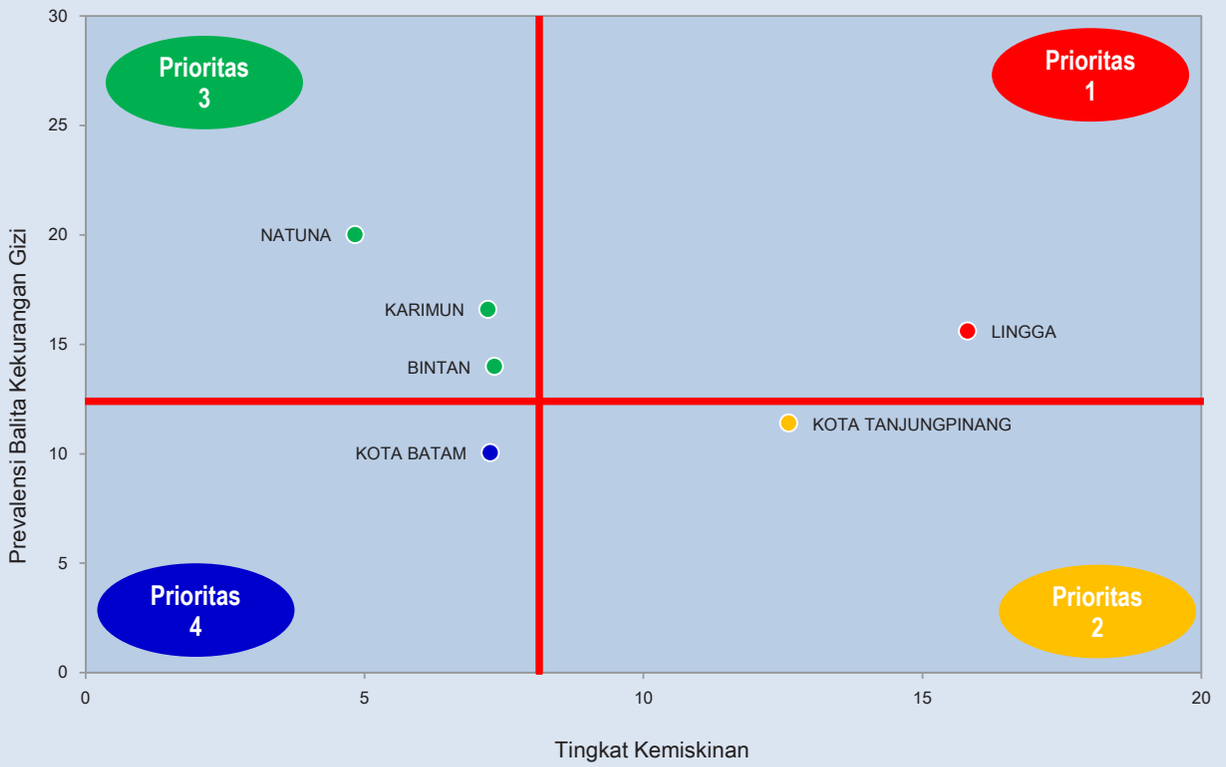

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Lingga.**

Gambar 35
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih

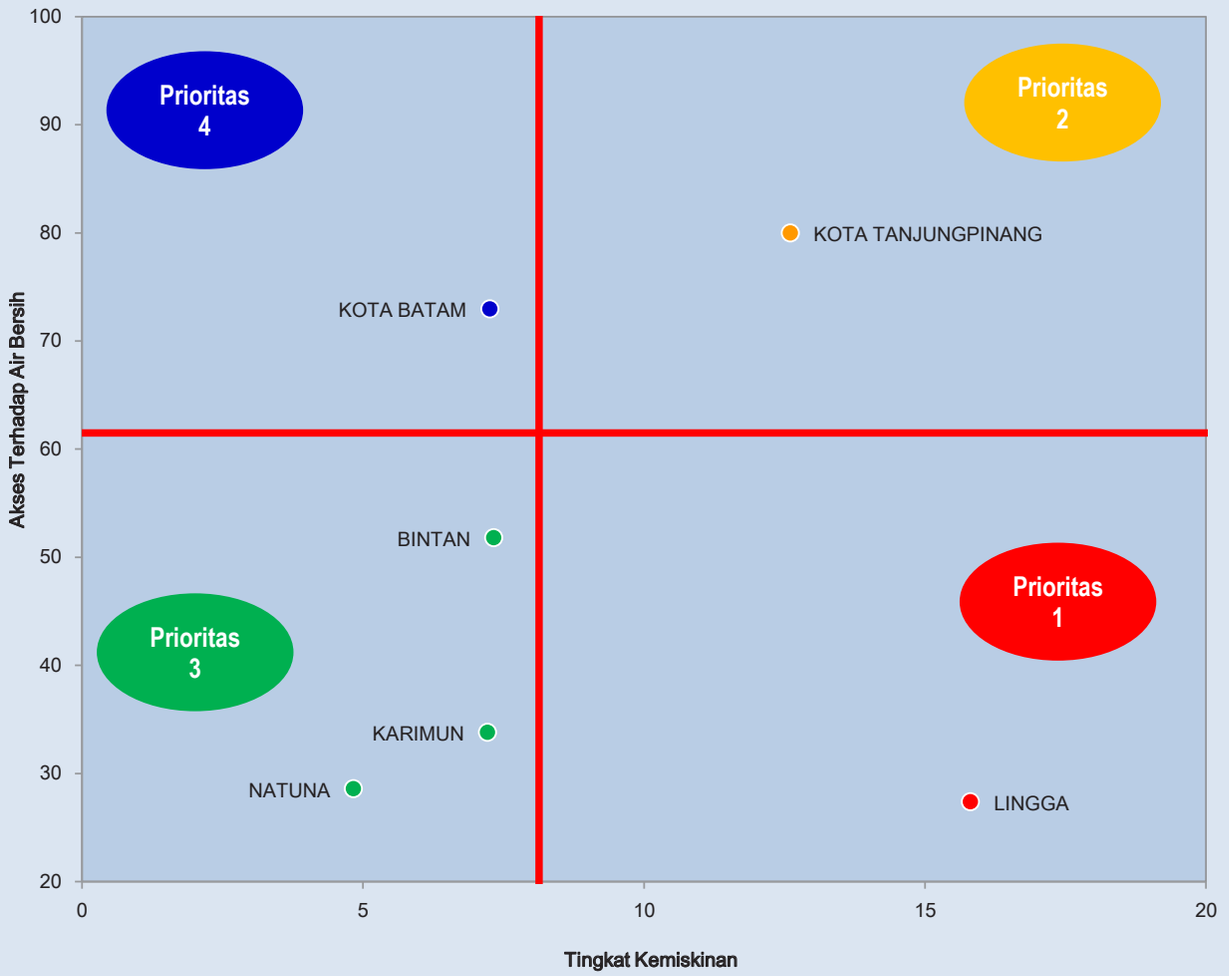

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan proporsi rumah tangga terhadap akses air bersih sebagai salah satu indikator utama dibidang infrastruktur dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses air bersih rendah. Wilayah-wilayah tersebut adalah: **Kabupaten Lingga.**

Gambar 36
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi

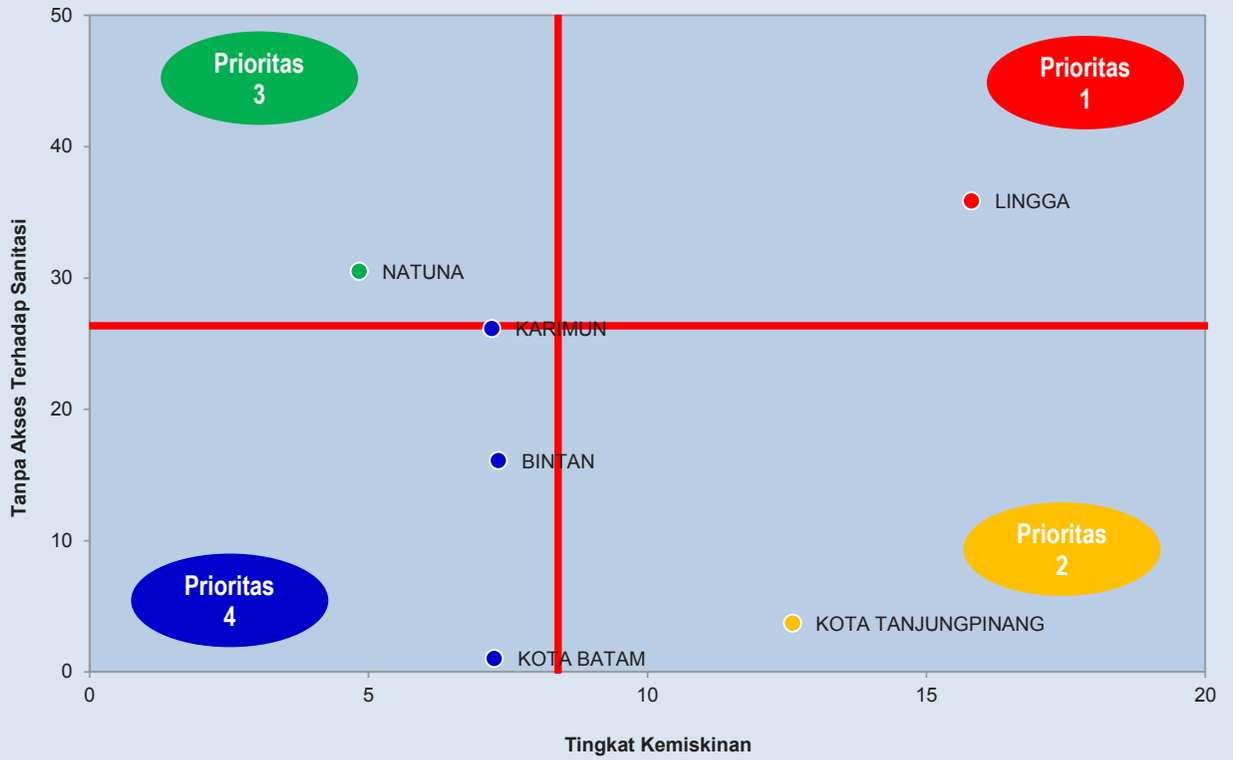

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan proporsi rumah tangga terhadap akses sanitasi sebagai salah satu indikator utama dibidang infrastruktur dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses sanitasi rendah. Wilayah tersebut adalah **Kabupaten Lingga.**

Gambar 37
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik

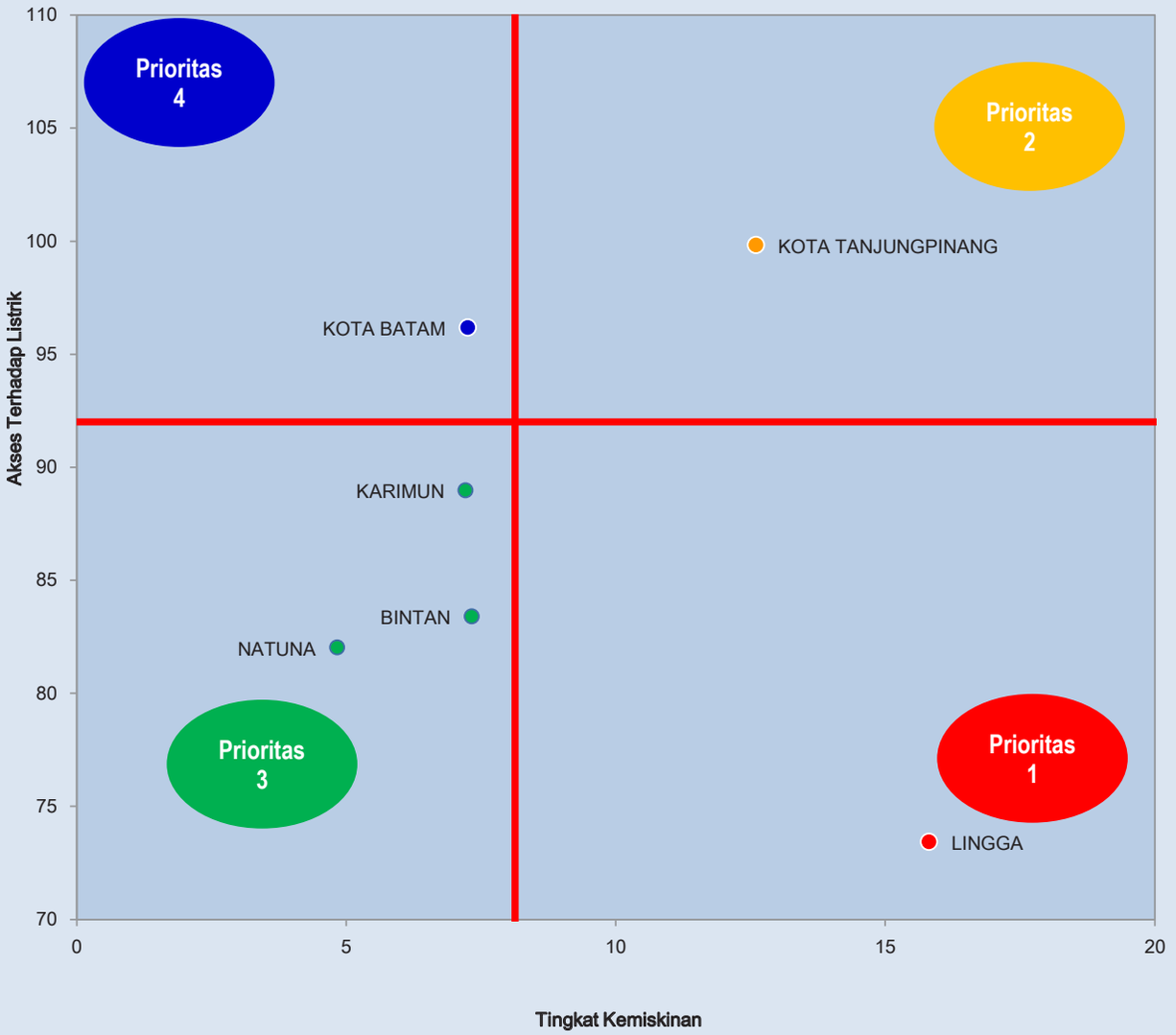

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan proporsi rumah tangga terhadap akses tenaga listrik sebagai salah satu indikator utama dibidang infrastruktur dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses tenaga listrik rendah. Wilayah tersebut adalah **Kabupaten Lingga.**

Gambar 38
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja

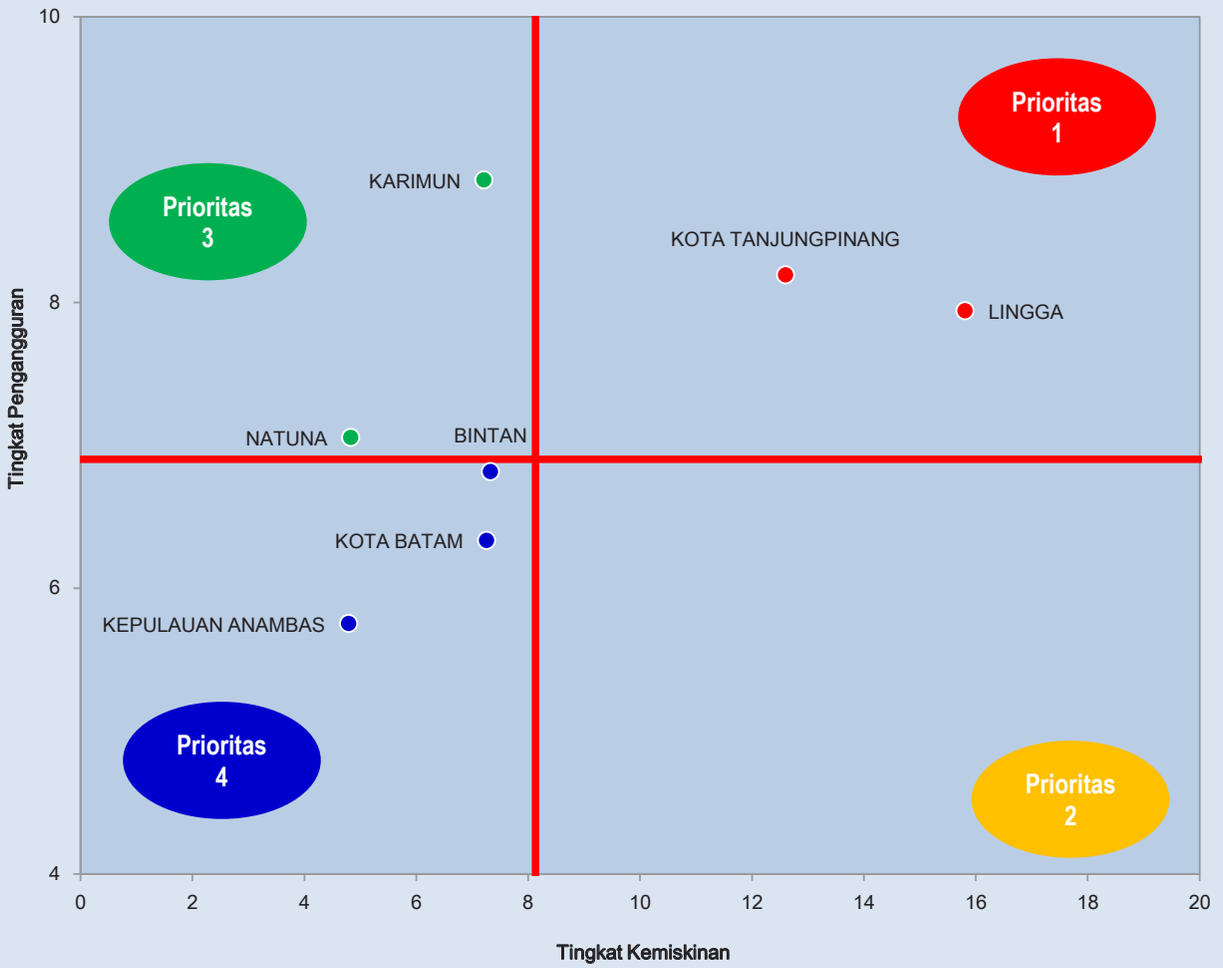

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan tingkat pengangguran sebagai salah satu indikator utama dibidang ketenagakerjaan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat pengangguran tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mencipatakan lapangan kerja dan investasi. Prioritas Kedua adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun tingkat pengangguran rendah. Pada wilayah ini diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya difokuskan pada permasalahan ketenagakerjaan. Wilayah prioritas tersebut diantaranya **Kabupaten Bangka Lingga dan Kota Tanjung Pinang.**

Tabel 11
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota[7]

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
LINGGA	1	1	1	2	1	1	1	1	1
KOTA TANJUNGPINANG	2	2	1	1	2	2	2	2	1
NATUNA	4	4	3	3	3	3	3	3	3
BINTAN	4	3	3	3	3	3	4	3	4
KARIMUN	4	4	3	4	3	3	4	3	3
KEPULAUAN ANAMBAS				3					4
KOTA BATAM	3	3	4	4	4	4	4	4	4

[7] Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.

Gambar 39
Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2011

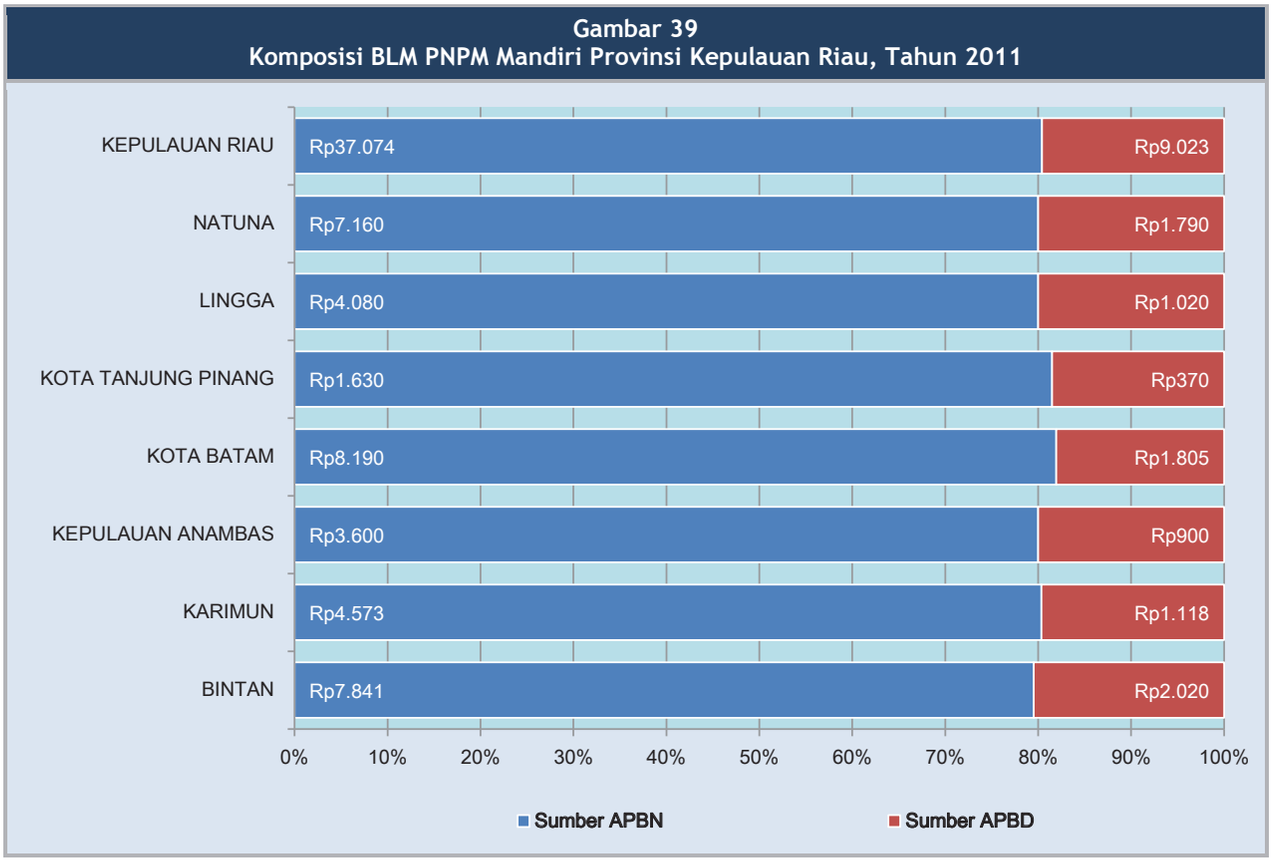

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BINTAN	9.200	661	9.861	7.841	2.020	10
KARIMUN	2.850	2.841	5.691	4.573	1.118	9
KEPULAUAN ANAMBAS	4.500		4.500	3.600	900	7
KOTA BATAM		9.995	9.995	8.190	1.805	12
KOTA TANJUNG PINANG		2.000	2.000	1.630	370	4
LINGGA	5.100		5.100	4.080	1.020	5
NATUNA	8.950		8.950	7.160	1.790	12
KEPULAUAN RIAU	**30.600**	**15.497**	**46.097**	**37.074**	**9.023**	**59**

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Gambar 40
Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011

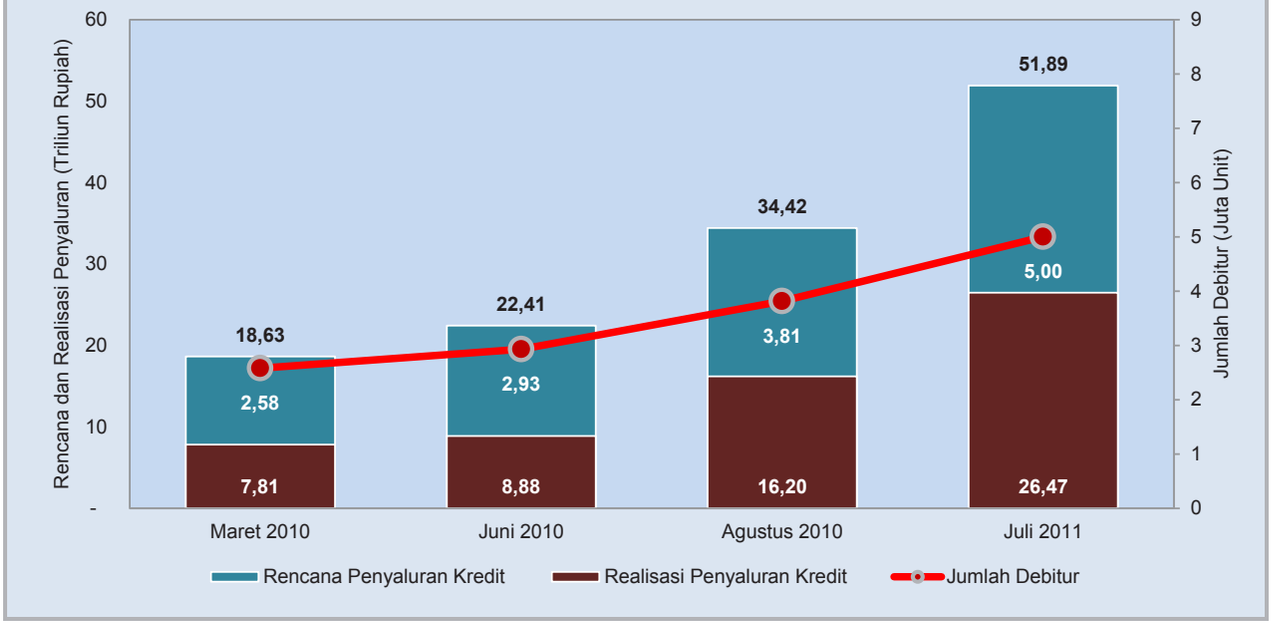

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 41
Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Kepulauan Riau, 2010 - 2011

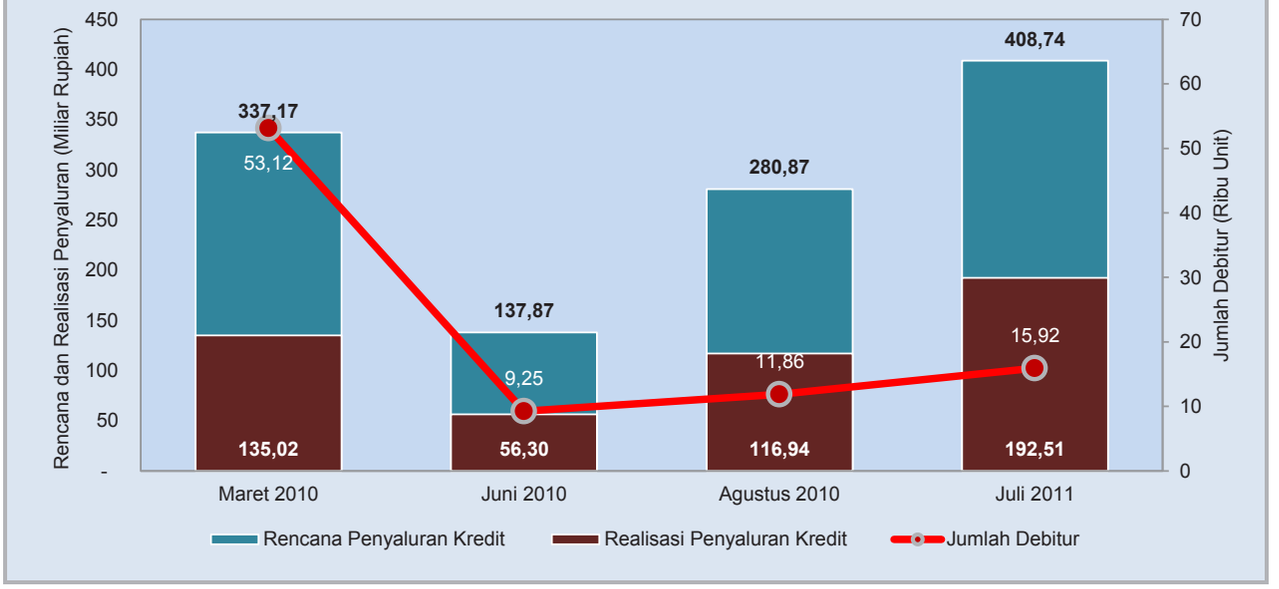

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Gambar 42
Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi
(Per 31 Juli 2011)

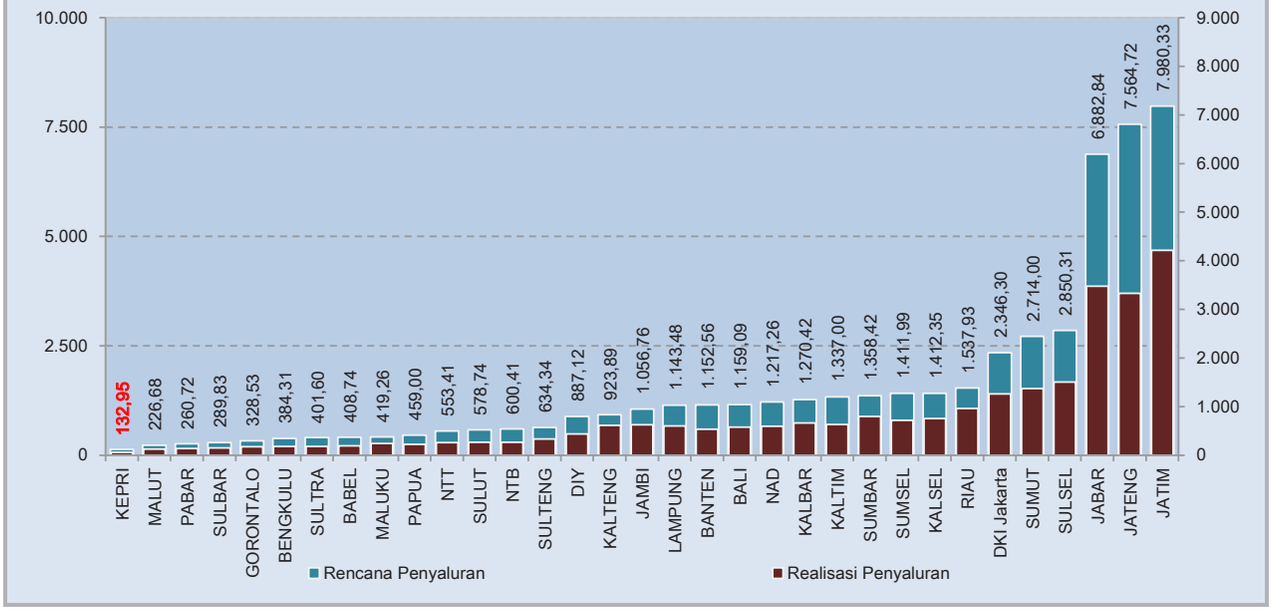

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 43
Jumlah Kredit Terserap Per Debitur Menurut Provinsi,
(Per 31 Juli 2011)

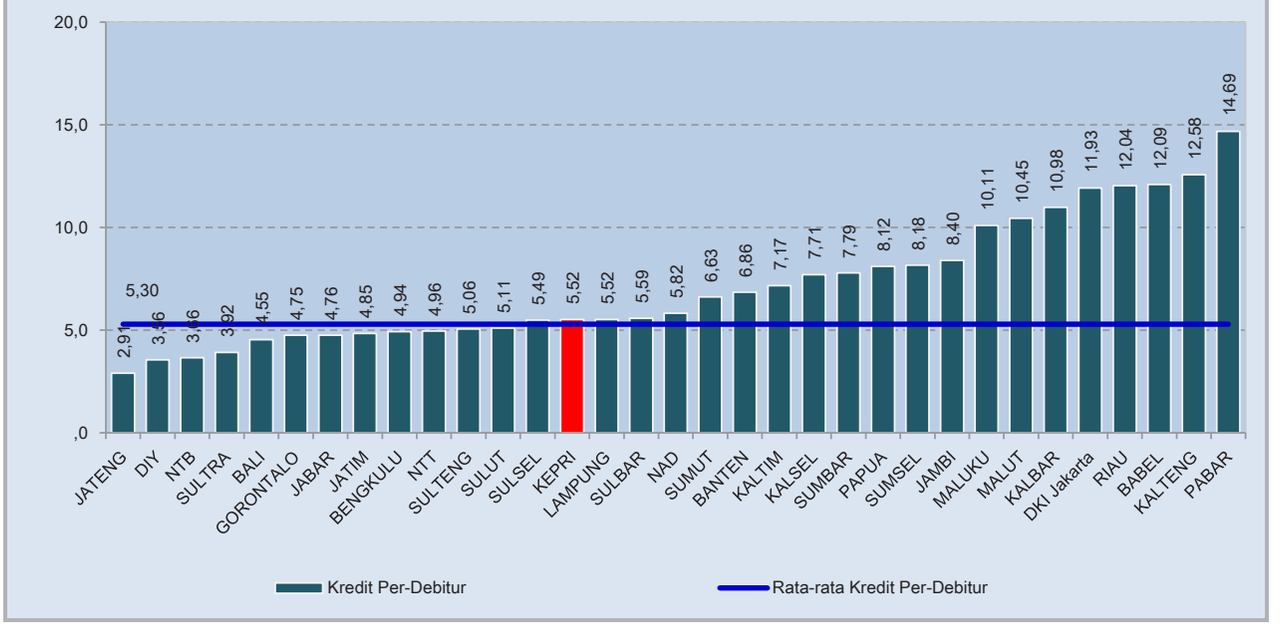

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 44
Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah)
(Per 31 Juli 2011)

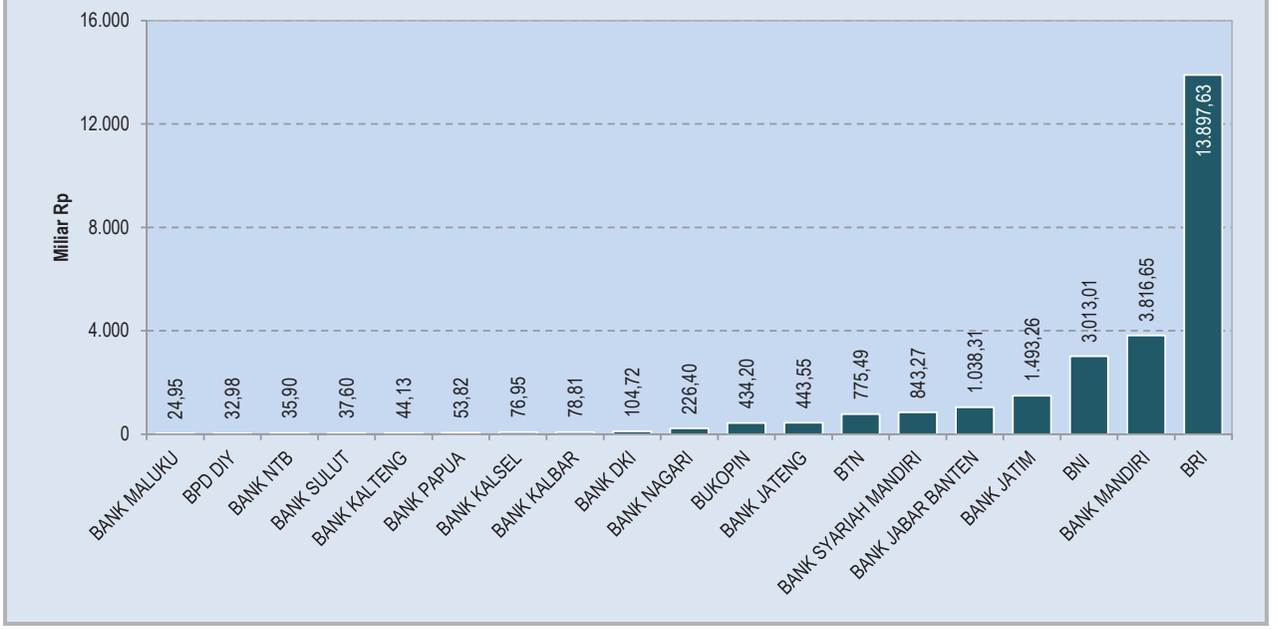

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 45
Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Kepulauan Riau (Juta Rupiah)
(Per 31 Juli 2011)

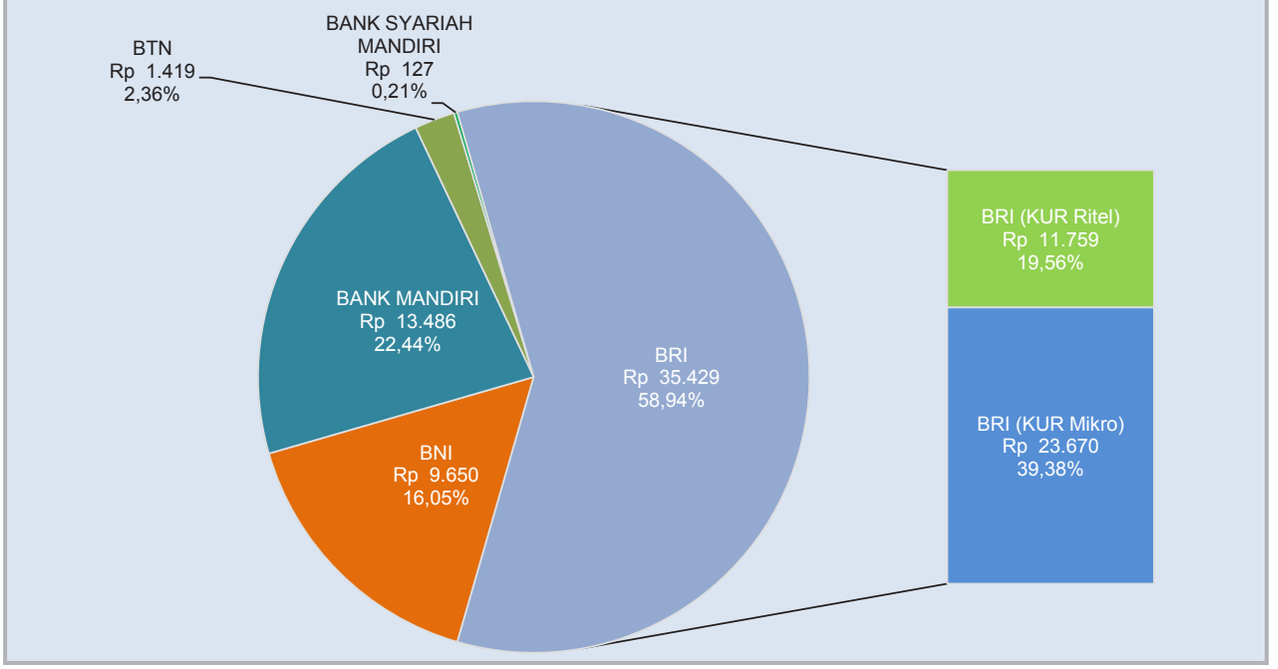

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Gambar 46
Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Juta Rupiah)

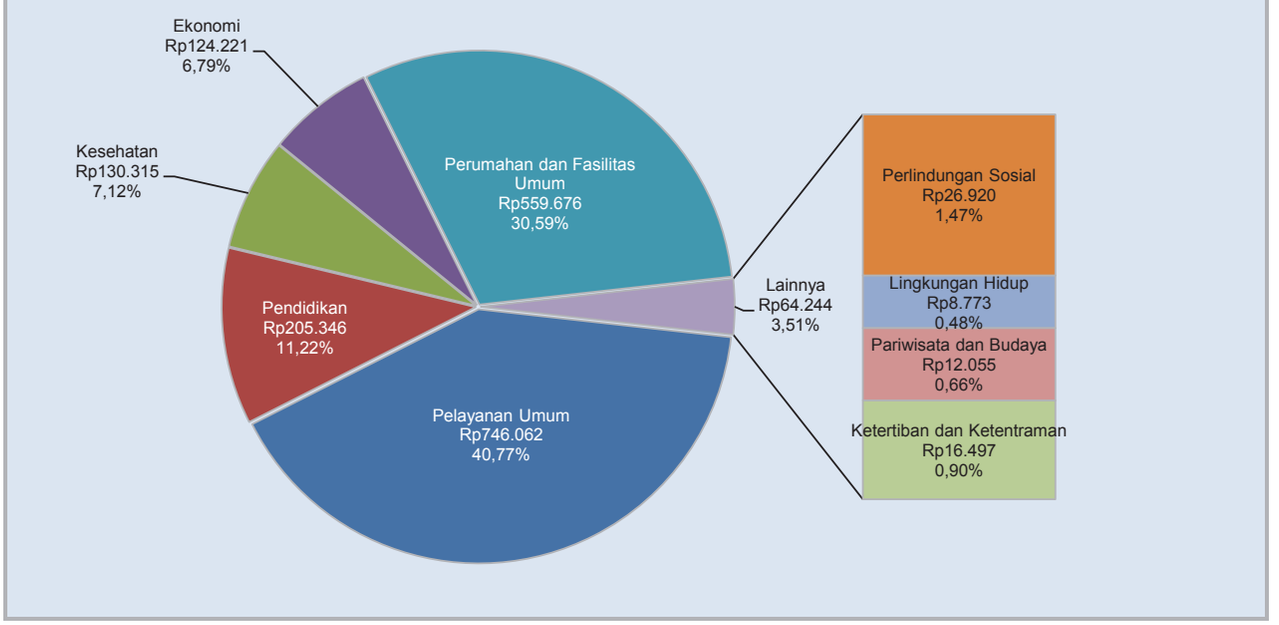

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

Gambar 47
Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2010

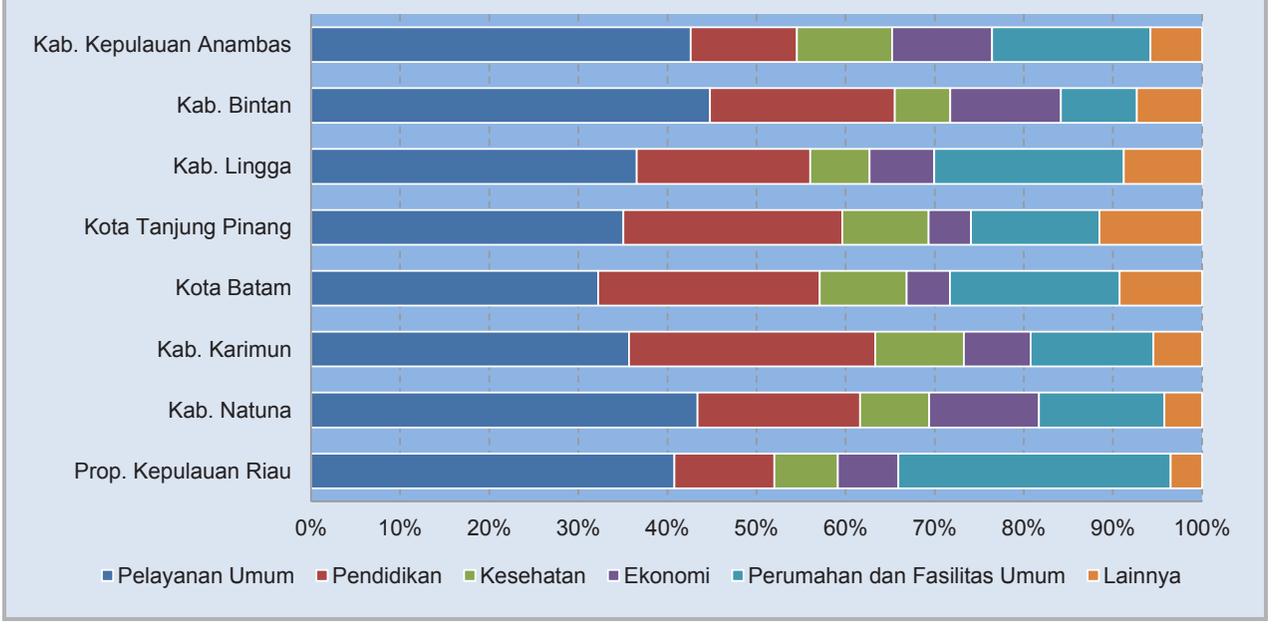

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010
Keterangan: Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).